



PEMERINTAH
PROVINSI GORONTALO

RANKHIR RENJA

Tahun 2027

Dinas Sosial, Kependudukan
dan Pencatatan Sipil



Jl. Brigjen Piola Isa, Kel. Dulomo Selatan
Kec. Kota Utara



<https://dinsos.gorontaloprov.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT karena atas izin-Nya Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Gorontalo Tahun 2027 ini dapat disusun. Penyusunan Rencana Kerja ini merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Gorontalo yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dalam program-program pembangunan.

Rencana Kerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Gorontalo Tahun 2027 berperan juga sebagai alat kendali, dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil dalam rangka menuju "Gorontalo Maju dan Sejahtera".

Semoga Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi dalam mewujudkan cita-cita pembangunan.

Gorontalo, Juli 2026

KEPALA DINAS,

REFLIN BUATA, SE, M.Ec.Dev
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19761228 200012 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	4
PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Dasar Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU	12
2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan Berupa IKU dan IKK Tahun 2025	12
2.2 Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025	30
2.3 Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2027 Berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2027 dan Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025 dan Kondisi Lingkungan Dinamis	Error! Bookmark not defined.
2.4 Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Error! Bookmark not defined.
2.5 Inovasi Bidang Urusan Dalam Upaya Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat	Error! Bookmark not defined.
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	
3.1 Tujuan dan Sasaran Tahun 2027 yang wajib sama dengan tujuan dan sasaran Renstra 2025-2029	
3.2 Arah Kebijakan yang sudah diselaraskan dengan Renstra Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2027, RKPD Tahun 2027 dan Kebijakan nasional/daerah lainnya	
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2027 yang disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029, Renstra Tahun 2025-2029 dan Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
4.2 Dapat ditambahkan secara khusus rencana kerja dan pendanaan untuk pencapaian program prioritas daerah, kontribusi terhadap pencapaian target nasional, pencapaian SPM dan Tematik lainnya sesuai bidang urusan	
BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
5.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Tahun 2025-2029 dan Evaluasi hasil Renja Tahun 2025	
5.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Tahun 2025-2029 dan Evaluasi hasil Renja Tahun 2025	
BAB VI PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo, serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2027. Renja menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam merumuskan program, kegiatan, subkegiatan, target kinerja, lokasi, kelompok sasaran, serta kebutuhan pendanaan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Penyusunan Renja Tahun 2027 dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, terukur, terintegrasi, dan responsif terhadap dinamika pembangunan serta kebutuhan masyarakat. Perubahan kondisi sosial, perkembangan isu kependudukan, tuntutan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perkembangan kebijakan nasional, serta kebutuhan penguatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi faktor penting yang perlu diakomodasi dalam perencanaan tahunan perangkat daerah.

Di bidang sosial, masih terdapat berbagai tantangan yang memerlukan perhatian secara berkelanjutan, antara lain penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), peningkatan kualitas pelayanan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, penanganan korban bencana, serta penguatan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial. Selain itu, diperlukan peningkatan akurasi dan pemutakhiran data sosial sebagai dasar perencanaan dan penetapan sasaran program agar pelaksanaan intervensi pemerintah semakin tepat sasaran.

Pada urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, tantangan yang dihadapi meliputi peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah, transparan, inklusif, dan berbasis digital, peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan, penguatan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik, serta peningkatan kualitas tata kelola administrasi kependudukan yang terintegrasi dengan berbagai sektor pembangunan. Data kependudukan yang akurat menjadi salah satu fondasi utama dalam perencanaan pembangunan, pelayanan publik, penyaluran bantuan sosial, penyelenggaraan pemilu, serta penyusunan berbagai kebijakan pemerintah.

Secara normatif, penyusunan Renja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo Tahun 2027 merupakan amanat berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap perangkat daerah wajib menyusun rencana kerja sebagai dokumen perencanaan tahunan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, termasuk urusan sosial serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Penyusunan Renja juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan sosial dan administrasi kependudukan.

Selain memenuhi amanat regulasi, Renja memiliki nilai strategis sebagai instrumen penghubung antara dokumen perencanaan jangka menengah dengan pelaksanaan pembangunan tahunan. Renja menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, penetapan Perjanjian Kinerja, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta pengukuran capaian kinerja perangkat daerah. Melalui Renja, setiap program, kegiatan, dan subkegiatan disusun secara sistematis berdasarkan prioritas pembangunan daerah, indikator kinerja yang terukur, kebutuhan masyarakat, serta kemampuan keuangan daerah.

Dengan demikian, penyusunan Renja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo Tahun 2027 diharapkan mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, akuntabel, adaptif, dan selaras dengan arah pembangunan nasional maupun daerah. Renja ini diharapkan menjadi pedoman dalam meningkatkan kualitas pelayanan sosial, memperkuat penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo Tahun 2027 disusun atas dasar mandat dan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

8. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan Dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
9. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 14 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2027;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2009 Tentang penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2013 tentang perubahan ke IV atas Perpres No 26. Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP el;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Kepmendagri Nomor 900.1 - 861 Tahun 2026 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
26. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No. 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029;
27. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pemerintah Daerah .
28. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor Tahun 2026 tentang RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2027

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo Tahun 2027 dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan tahunan perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Renja Tahun 2027 menjadi acuan dalam penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan yang terarah, terukur, terpadu, efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan sasaran pembangunan daerah, kebijakan nasional, serta kemampuan keuangan daerah.

Selain itu, Renja Tahun 2027 dimaksudkan untuk menjamin keterpaduan dan konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2029, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2027, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2029, serta dokumen penganggaran daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo Tahun 2027 bertujuan untuk:

1. Menjamin keterpaduan, keselarasan, dan konsistensi antara Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2029, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2027, serta dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
2. Menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target, lokasi, kelompok sasaran, dan kebutuhan pendanaan Tahun Anggaran 2027.
3. Menjamin pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2029 melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan secara efektif, efisien, terukur, dan akuntabel.

4. Mendukung pencapaian target dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2027 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo.
5. Menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2027 serta sebagai acuan dalam pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja perangkat daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan berupa IKU dan IKK Tahun 2025 (Capaian tahun pertama Renstra 2025-2029)
- 2.2 Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025
- 2.3 Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2027
- 2.4 Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD
- 2.5 Inovasi bidang urusan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2027
- 3.2 Arah Kebijakan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2027
- 4.2 Dapat ditambahkan secara khusus rencana kerja dan pendanaan untuk pencapaian program prioritas daerah

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menyajikan target kinerja indikator bidang urusn yang meliputi :

- 5.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025
- 5.2 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

BAB VI PENUTUP

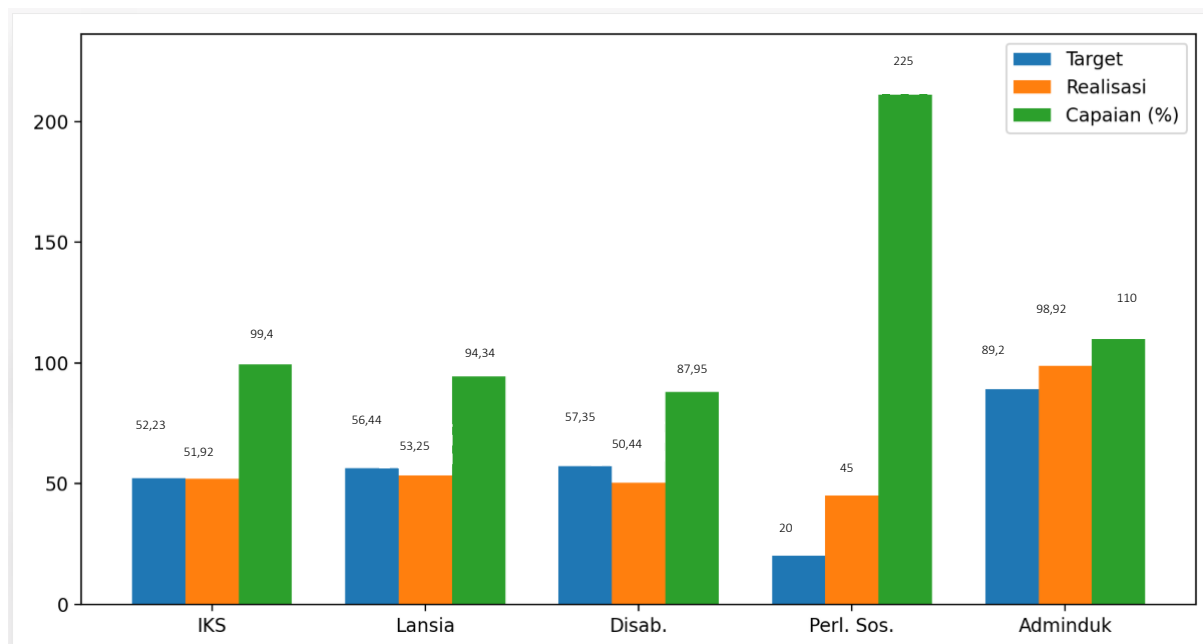
BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan berupa IKU dan IKK Tahun 2025

Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025 menyajikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja Dinas Sosial, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil berdasarkan target dan realisasi indikator yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, sekaligus menjadi dasar dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kendala pelaksanaan kinerja. Hasil evaluasi IKU dan IKK Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan dan penyempurnaan kebijakan serta strategi pelaksanaan program pada periode berikutnya guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Secara rinci, capaian masing-masing indikator disajikan pada Grafik berikut :

A. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, secara umum capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan hasil yang baik.

➤ **Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS)**

Target Ikesos sebesar 52,23 dengan realisasi 51,92, sehingga capaian kinerja mencapai 99,40% (kategori **Maju**). Capaian ini menunjukkan bahwa target hampir seluruhnya dapat dicapai. Selisih yang masih terjadi disebabkan oleh belum optimalnya peningkatan kesejahteraan pada sebagian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), keterbatasan anggaran, serta masih adanya dinamika sosial ekonomi masyarakat yang memengaruhi efektivitas intervensi program.

Upaya perbaikan pada Tahun 2027 yakni meningkatkan ketepatan sasaran program melalui pemanfaatan DTSEN, memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota, serta mengoptimalkan pelaksanaan program rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

➤ **IKESOS Lansia**

Target IKESOS Lansia sebesar 56,44 dengan realisasi 53,25 atau mencapai 94,34% (kategori **Maju**). Capaian ini dipengaruhi oleh belum optimalnya cakupan pelayanan rehabilitasi sosial bagi lanjut usia, keterbatasan jangkauan layanan, serta masih terbatasnya dukungan keluarga dan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan lansia terlantar.

Upaya perbaikan Tahun 2027 yakni memperluas cakupan pelayanan rehabilitasi sosial lanjut usia, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, mengoptimalkan bantuan ATENSI, serta memperkuat peran keluarga dan lembaga kesejahteraan sosial dalam pelayanan lanjut usia

➤ **IKESOS Disabilitas**

Target IKESOS Disabilitas sebesar 57,35 dengan realisasi 50,44, sehingga capaian mencapai 87,95% (kategori **Maju**). Capaian ini merupakan yang terendah dibanding indikator lainnya. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh masih terbatasnya akses penyandang disabilitas terhadap layanan rehabilitasi sosial, alat bantu, pemberdayaan ekonomi, serta belum optimalnya pemutakhiran data penyandang disabilitas.

Upaya perbaikan Tahun 2027 yakni meningkatkan akurasi data penyandang disabilitas melalui DTSEN, memperluas pemberian alat bantu dan layanan rehabilitasi sosial, meningkatkan pelatihan kemandirian penyandang disabilitas, serta memperkuat koordinasi dengan kementerian, pemerintah kabupaten/kota, dan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial.

➤ **Indikator Persentase masyarakat rentan yang mendapatkan perlindungan sosial**

Target pelayanan perlindungan sosial sebesar **20** dengan realisasi **45**, sehingga capaian mencapai **225%**. Capaian yang melampaui target disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan pelayanan akibat kondisi kedaruratan, bencana alam maupun bencana sosial yang memerlukan penanganan lebih besar dibandingkan target yang telah direncanakan. Selain itu, adanya dukungan pemerintah pusat melalui bantuan logistik dan program penanganan darurat turut meningkatkan realisasi pelayanan.

Upaya perbaikan Tahun 2027 yakni menyusun target yang lebih realistis berdasarkan tren kebutuhan pelayanan, memperkuat kesiapsiagaan bencana, meningkatkan ketersediaan logistik kebencanaan, serta memperkuat koordinasi dengan BPBD, pemerintah kabupaten/kota, dan instansi terkait dalam penanganan korban bencana.

➤ **Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan**

Target Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kependudukan sebesar 89,20 dengan realisasi 98,92, sehingga capaian mencapai 110%. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan administrasi kependudukan telah melampaui target yang ditetapkan. Keberhasilan tersebut didukung oleh peningkatan kualitas pembinaan kepada kabupaten/kota, pemanfaatan teknologi informasi, penyederhanaan proses pelayanan, serta meningkatnya kompetensi aparatur penyelenggara administrasi kependudukan.

Upaya perbaikan Tahun 2027 yakni mempertahankan kualitas pelayanan melalui penguatan transformasi digital, peningkatan kompetensi SDM, optimalisasi pemanfaatan data kependudukan, serta peningkatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan di kabupaten/kota.

B. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					
1	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial	Persentase	100	100	100	
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah provinsi	%	100	100	100	
3	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	98,91	98,91	
4	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Persentase	16,19	36,42	224	
5	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100	100	
6	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	Persentase	100	100	100	
7	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	Persentase	7,97	11,75	147	
8	Persentase sarana prasarana bagi korban bencana yang disediakan sesuai standar	%	100	100	100	
9	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	Persentase	100	100	100	
10	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100	100	
11	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	90	90	
12	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	Persentase	100	100	100	
13	Persentase sarana prasarana yang disediakan bagi peyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan/atau gelandangan dan pengemis didalam panti yang layak dan sesuai standar	%	100	100	100	
14	Persentase sarana prasarana bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang disediakan secara layak dan sesuai standar	%	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
1	Tingkat Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Persentase	67,56	66,67	98,68	
2	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase	100	100	100	
3	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100	100	100	
4	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Persentase	100	100	100	
5	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Persentase	10	15,04	150	
6	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persentase	55	67,07	121	
7	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	99,1	99,85	100	
8	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100	100	100	
9	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100	100	100	
10	Jumlah Dokumen Data Kependudukan Provinsi Yang Tersedia	Persentase	1	1	100	

➤ **Analisis Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Sosial yakni :**

Secara umum, kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Tahun 2026 menunjukkan hasil yang baik. Dari 14 indikator kinerja, sebanyak 11 indikator (78,57%) telah mencapai target 100%, menunjukkan bahwa pelaksanaan program rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, serta pemberdayaan sosial telah berjalan sesuai target yang ditetapkan. Keberhasilan tersebut didukung oleh koordinasi yang baik dengan pemerintah kabupaten/kota, lembaga kesejahteraan sosial, serta dukungan program pemerintah pusat.

Terdapat dua indikator yang melampaui target, yaitu Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar dengan capaian 224% dan Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi dengan capaian 147%. Capaian yang melebihi target disebabkan oleh meningkatnya jumlah masyarakat yang membutuhkan layanan sosial serta adanya dukungan program rehabilitasi sosial dan bantuan sosial dari pemerintah pusat, khususnya melalui program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dan program pemberdayaan sosial yang mampu menjangkau

penerima manfaat lebih banyak dibandingkan target awal. Kondisi ini menunjukkan tingginya kebutuhan pelayanan sosial di masyarakat sekaligus efektivitas pelaksanaan program.

Di sisi lain, masih terdapat indikator yang belum mencapai target, yaitu Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti dengan capaian 98,91% dan Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya dengan capaian 90%. Belum optimalnya capaian tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan daya tampung layanan rehabilitasi sosial, perubahan kondisi penerima manfaat, keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan, serta dinamika data sasaran yang memerlukan pemutakhiran secara berkala. Selain itu, penjangkauan terhadap kelompok rentan tertentu masih menghadapi kendala geografis dan koordinasi lintas wilayah.

Untuk meningkatkan capaian kinerja pada Tahun 2027, Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo akan melakukan beberapa langkah perbaikan, antara lain:

1. Meningkatkan akurasi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta pelaksanaan verifikasi dan validasi data secara berkala.
2. Memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, lembaga kesejahteraan sosial, dan kementerian/lembaga terkait untuk memperluas cakupan pelayanan sosial.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, anak, gelandangan dan pengemis melalui penguatan kapasitas lembaga dan penyediaan sarana prasarana yang memadai.
4. Mengoptimalkan pelaksanaan program pemberdayaan sosial agar penerima manfaat memiliki kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.
5. Menyusun target kinerja yang lebih realistis berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program, tren kebutuhan masyarakat, dan kondisi riil di lapangan.

6. Memperkuat monitoring dan evaluasi pelaksanaan program secara berkala untuk memastikan efektivitas intervensi serta mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

➤ **Analisis Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Secara umum, capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik. Dari 10 indikator kinerja, 7 indikator mencapai target 100%. Capaian tersebut didukung oleh pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah kabupaten/kota yang berjalan efektif, pemanfaatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), serta koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota.

Terdapat dua indikator yang melampaui target, yaitu Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dengan capaian 150% dan Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) dengan capaian 121%. Tingginya capaian kedua indikator tersebut dipengaruhi oleh intensifikasi pelaksanaan aktivasi IKD melalui berbagai kegiatan pelayanan jemput bola, sosialisasi kepada masyarakat, serta meningkatnya komitmen pemerintah kabupaten/kota dalam memperluas cakupan kepemilikan dokumen kependudukan. Selain itu, meningkatnya pemanfaatan layanan administrasi kependudukan berbasis digital turut mendorong percepatan pencapaian target.

Sementara itu, indikator Tingkat Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan memperoleh capaian 98,68%, sedikit di bawah target yang ditetapkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh masih adanya penduduk yang belum melakukan perekaman atau pembaruan dokumen kependudukan, perpindahan penduduk yang belum dilaporkan, keterbatasan akses pelayanan pada wilayah tertentu, serta masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan secara tepat waktu.

Untuk meningkatkan capaian kinerja pada Tahun 2027, Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota guna memastikan kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan semakin baik.
2. Mendorong percepatan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan melalui pelayanan jemput bola, pelayanan terpadu, serta perluasan akses pelayanan pada wilayah yang cakupan kepemilikannya masih rendah.
3. Mengoptimalkan implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, serta peningkatan kapasitas petugas pelayanan.
4. Memperkuat pemanfaatan data kependudukan dalam mendukung pelayanan publik, perencanaan pembangunan, dan penyelenggaraan pemerintahan.
5. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan perekaman, penerbitan dokumen kependudukan, dan pemutakhiran data penduduk secara berkelanjutan.
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian indikator administrasi kependudukan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan penetapan target kinerja yang lebih realistis pada tahun berikutnya.

Capaian Hasil Evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2025 sesuai dengan hasil inputan Evaluasi Renja pada SIPD dalev Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo sampai dengan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025
Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2029 (Akhir Periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA- SKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA- SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA- SKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2025 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket							
								I		II		III		IV													
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%	16	17		
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K			%	
		1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		81.457.013		-		22.897.897		3.660.812		4.117.302		6.957.079		6.389.300		21.124.492		21.124.492	26.21	25.93				
		1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			57.141.692		-		11.391.186		2.722.671		2.666.187		2.801.169		2.270.338		10.460.365		10.460.365	36.69	18.31	Dinas Sosial		
			Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase (%) layanan administrasi, sarana prasarana, SDM aparatur serta perencanaan dan pelaporan (%)		0		100		23,9		23,41		24,59		19,93		91,83		91,83		0	0				
				Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100		0		0		0		0		0		0		0		0	0					
			1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.815.132		-		547.892		114.949		80.988		137.577		208.578		542.093		542.093	2.5	14.21		
				Terlaksananya pengumpulan data statistik sektoral daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0		0		1		0		0		1		0		0		0		0	0		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		0		0		8		4		3		1		0		0		0		0	0			

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%		
		1.06.01.1.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			-		-		9.450		-		1.991		1.837		5.488		9.316		9.316	0	0		
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0		0		1		0		0		1		0		0		0		0	0		
		1.06.01.1.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			-		-		22.876		6.986		8.000		5.385		2.427		22.798		22.798	0	0		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0		0		8		4		3		1		0		0		0		0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5		0		8		0		0		1		0		0		0		0	0		
		1.06.01.1.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2.942.148		-		440.349		77.175		65.592		115.505		176.838		435.111		435.111	0	14.79		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5		0		8		0		0		1		0		0		0		0	0		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	20		0		3		1		1		1		1		1		1		5	0		
		1.06.01.1.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			872.985		-		75.218		30.788		5.405		14.851		23.825		74.868		74.868	5	8.58		
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	20		0		3		1		1		1		1		1		1		5	0	
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			45.591.482		-		8.745.434		2.427.547		2.321.683		1.720.312		1.652.366		8.121.909		8.121.909	119.43	17.81			
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	377		0		73		69		69		69		69		69		69		18.3	0			
	1.06.01.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			44.912.260		-		8.622.320		2.412.331		2.297.225		1.693.286		1.597.573		8.000.414		8.000.414	18.3	17.81			
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	377		0		73		69		69		69		69		69		69		18.3	0			
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5		0		1		0		0		0		12		12		12		240	0			

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%		
		1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			556.798		-		110.550		14.449		21.118		25.446		48.504		109.518		109.518	240	19.67		
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5		0		1		0		0		0		12		12		12		240	0		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		2		0		0		0		1		1		1		100	0		
		1.06.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			122.424		-		12.564		767		3.340		1.580		6.290		11.977		11.977	100	9.78		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		2		0		0		0		1		1		1		100	0		
		1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			666.511		-		65.053		13.681		4.650		11.030		35.485		64.846		64.846	19	9.73		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	50		0		71		5		1		1		19		19		19		38	0		
		1.06.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			520.333		-		55.053		13.681		4.650		1.030		35.485		54.846		54.846	38	10.54		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	50		0		71		5		1		1		19		19		19		38	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	80		0		71		0		0		1		0		0		0		0	0		
		1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			146.178		-		10.000		-		-		10.000		-		10.000		10.000	0	6.84		
			Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	80		0		71		0		0		1		0		0		0		0	0		

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%		
		1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			670.23 9		-		126.99 2		12.07 0		30.909		26.198		53.47 3		122.65 1		122.65 1	31.43	18.3		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	15		0		1		3		3		0		3		3		3		20	0		
		1.06.01.1.06.000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			103.45 3		-		30.490		5.292		9.606		733		13.44 9		29.081		29.081	20	28.11		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	15		0		1		3		3		0		3		3		3		20	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		0		1		1		1		1		1		1		1		20	0		
		1.06.01.1.06.000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			78.679		-		10.459		1.200		2.953		2.452		3.056		9.660		9.660	20	12.28		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		0		1		1		1		1		1		1		1		20	0		
			Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1		0		1		0		1		1		1		1		1		100	0		
		1.06.01.1.06.000 7	Penyediaan Bahan/Material			25.755		-		5.200		-		2.250		1.150		750		4.150		4.150	100	16.11		
			Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1		0		1		0		1		1		1		1		1		100	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		1		0		1		1		1		1		1		20	0		
		1.06.01.1.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			67.859		-		14.913		-		4.676		2.815		7.372		14.862		14.862	20	21.9		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		1		0		1		1		1		1		1		20	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5		0		1		0		0		0		1		1		1		20	0		
		1.06.01.1.06.000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu			188.88 9		-		38.500		3.629		5.331		14.527		14.73 8		38.225		38.225	20	20.24		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5		0		1		0		0		0		1		1		1		20	0		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5		0		1		1		1		0		1		1		1		20	0		

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%		
		1.06.01.1.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			86.487		-		17.100		1.949		6.094		3.640		5.227		16.910		16.910	20	19.55		
			Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5		0		1		1		1		0		1		1		1		20	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		1		0		0		1		1		1		1		20	0		
		1.06.01.1.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			119.116		-		10.330		-		-		882		8.881		9.763		9.763	20	8.2		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		1		0		0		1		1		1		1		20	0		
		1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-		-		516.85 0		-		-		516.200		-		516.20 0		516.20 0	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0		0		2		0		0		1		0		1		1		0	0		
		1.06.01.1.07.000 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-		-		516.85 0		-		-		516.200		-		516.20 0		516.20 0	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0		0		2		0		0		1		0		1		1		0	0		
		1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.705.44 1		-		728.40 0		114.99 6		145.789		151.299		203.77 8		615.86 1		615.86 1	35	16.62		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	10		0		1		3		3		3		3		3		3		30	0		
		1.06.01.1.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.485.61 5		-		488.40 0		79.020		122.829		122.880		163.58 0		488.30 9		488.30 9	30	19.65		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	10		0		1		3		3		3		3		3		3		30	0		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5		0		3		2		2		2		2		2		2		40	0		

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%		
		1.06.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.219.82 5		-		240.00 0		35.97 6		22.959		28.420		40.198		127.55 3		127.55 3	40	10.46		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5		0		3		2		2		2		2		2		2		40	0		
		1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.692.88 7		-		660.56 5		39.42 8		82.167		238.552		116.65 8		476.80 5		476.80 5	10.64	17.71		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		0		1		1		1		1		1		1		1		20	0		
		1.06.01.1.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			389.235		-		84.680		6.508		9.966		17.375		9.000		42.850		42.850	20	11.01		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		0		1		1		1		1		1		1		1		20	0		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	60		0		14		11		11		12		12		12		12		20	0		
		1.06.01.1.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.671.77 2		-		329.69 1		32.91 9		63.195		62.406		64.701		223.22 1		223.22 1	20	13.35		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	60		0		14		11		11		12		12		12		12		20	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	27 5		0		55		0		13		20		7		7		7		2.55	0		
	1.06.01.1.09.000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			266.352		-		121.72 4		-		9.006		37.121		40.958		87.084		87.084	2.55	32.7			
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	27 5		0		55		0		13		20		7		7		7		2.55	0			
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		0		1		0		0		1		0		0		0		0	0			
	1.06.01.1.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			365.528		-		124.47 0		-		-		121.650		2.000		123.65 0		123.65 0	0	33.83			

[illegible]

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%		
		1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		-	-		77.158		17.942		12.565		10.295		21.006		61.808		61.808	0	0				
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	0		0	2		3	4		1		2		10		10		0	0				
		1.06.02.1.01.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		-	-		77.158		17.942		12.565		10.295		21.006		61.808		61.808	0	0				
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	0		0	2		3	4		1		2		10		10		0	0				
		1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi		1.640.402	-		1.052.508		118.266		145.507		367.187		261.150		892.110		892.110	4.57	54.38				
			Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	0		0	77		77	77		70		17		241		241		0	0				
				Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi (Lembaga)	175		0	25		0	0		12		8		8		8		4.57	0				
		1.06.02.1.02.002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi		-	-		735.630		96.185		136.579		218.769		174.065		625.598		625.598	0	0				
			Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	0		0	77		77	77		70		17		241		241		0	0				
		1.06.02.1.02.004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi		1.640.402	-		316.879		22.081		8.927		148.418		87.085		266.512		266.512	4.57	16.25				
			Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi (Lembaga)	175		0	25		0	0		12		8		8		8		4.57	0				

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%		
				Persentase lanjut usia terlanjar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
				Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
				Persentase anak terlanjar, lanjut usia terlanjar, penyandang disabilitas , gelandang dan pengemis yang meningkatkan keberfungsian sosialnya melalui rehabilitasi sosial dasar di dalam panti (%)			0		100		6,4		10		21		52		89,4		89,4		0		0	
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti (Persentase)	100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
				Persentase penyandang disabilitas terlanjar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	500		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
				Persentase sarana prasarana yang disediakan bagi penyandang disabilitas terlanjar, anak terlanjar, lanjut usia terlanjar dan/atau gelandangan dan pengemis didalam panti yang layak dan sesuai standar (%)	100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlanjar di dalam Panti		1.785.402		-		501.821		32.140		50.198		103.393		259.714		445.446		445.446		25.02	24.95		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlanjar (Dokumen)	0		0		2		0		0		1		1		2		2		0	0		

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%		
		1.06.04.1.01.00 12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyangdang Disabilitas TerlAntar		-		-		37.747		5.767		-		10.679		20.362		36.809		36.809	0	0			
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyangdang Disabilitas TerlAntar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyangdang Disabilitas TerlAntar (Dokumen)	0	0		2		0		0		1		1		2		2		0	0			
			Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Orang)	19	0		10		4		5		8		25		25		25		131.58	0			
		1.06.04.1.01.00 01	Penyediaan Permakanan			811.369		-		194.340		3.720		13.026		16.188		119.135		152.069		152.069	131.58	18.74		
			Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Orang)	19	0		10		4		5		8		25		25		25		131.58	0			
			Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi (Orang)	81	0		10		0		0		10		0		0		0		0	0			
		1.06.04.1.01.00 02	Penyediaan Sandang			97.020		-		38.764		-		-		38.753		-		38.753		38.753	0	39.94		
			Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi (Orang)	81	0		10		0		0		10		0		0		0		0	0			
			Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi (Orang)	81	0		10		4		5		8		5		5		5		6.17	0			
		1.06.04.1.01.00 03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses			221.673		-		49.340		500		1.000		3.333		37.108		41.941		41.941	6.17	18.92		
			Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi (Orang)	81	0		10		4		5		8		5		5		5		6.17	0			

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%		
		1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti			673.039		-		1.035.452		22.575		283.766		292.050		414.424		1.012.815		1.012.815	10.44	150.48		
		1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan			-		-		573.350		3.600		201.908		131.581		221.854		558.943		558.943	0	0		
			Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Orang)	0		0		45		45		45		45		45		180		180		0	0		
		1.06.04.1.02.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti			-		-		289.561		18.975		41.638		99.576		129.249		289.437		289.437	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti (Dokumen)	0		0		2		0		0		1		1		2		2		0	0		
			Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi (Orang)	300		0		45		0		34		10		1		1		1		0.33	0		
		1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang			259.545		-		55.000		-		23.221		20.774		11.000		54.995		54.995	0.33	21.19		
			Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi (Orang)	300		0		45		0		34		10		1		1		1		0.33	0		
			Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Orang)	300		0		45		0		0		45		45		45		45		15	0		
		1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial			196.243		-		44.066		-		-		11.234		32.731		43.965		43.965	15	22.4		
			Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Orang)	300		0		45		0		0		45		45		45		45		15	0		
			Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi (Orang)	300		0		45		0		0		45		45		45		45		15	0		

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)		
		1.06.04.1.02.007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			135.230		-		42.975		-		-		27.385		15.590		42.975		42.975	15	31.78		
			Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi (Orang)	300		0		45		0		0		45		45		45		45		15	0		
			Terpenuhihnya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi (Orang)	70		0		45		0		34		3		8		8		8		11.43	0		
		1.06.04.1.02.009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			82.020		-		30.500		-		17.000		1.500		4.000		22.500		22.500	11.43	27.43		
			Terpenuhihnya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi (Orang)	70		0		45		0		34		3		8		8		8		11.43	0		
		1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti			11.238.064		-		1.195.254		211.073		168.727		191.947		567.845		1.139.592		1.139.592	23.37	10.14		
		1.06.04.1.03.009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			-		-		6.000		-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terpenuhihnya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi (Orang)	0		0		23		0		0		0		0		0		0		0	0		
		1.06.04.1.03.013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti			-		-		53.691		940		840		5.419		44.314		51.513		51.513	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi (Dokumen)	0		0		2		0		0		0		2		2		2		0	0		
		Terpenuhihnya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)	145		0		5		0		0		0		23		23		23		15.86	0			

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17	
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%			
		1.06.04.1.03.001 0	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			256.050		-		25.265		-		-		-		21.227		21.227		21.227	15.86	8.29			
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)	14 5		0		5		0		0		0		23		23		23		15.86	0			
			Terlaksananya Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi (Orang)	4		0		8		1		1		0		0		0		0		0	0			
		1.06.04.1.03.001 2	Pemulasaraan			102.020		-		20.000		2.500		2.500		-		-		5.000		5.000	0	4.9			
			Terlaksananya Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi (Orang)	4		0		8		1		1		0		0		0		0		0	0			
			Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Orang)	14 5		0		23		16		15		22		55		55		55		37.93	0			
		1.06.04.1.03.000 1	Penyediaan Permakanan			1.656.16 7		-		300.00 0		29.37 6		43.374		74.121		148.25 4		295.12 5		295.12 5	37.93	17.82			
				Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Orang)	14 5		0		23		16		15		22		55		55		55		37.93	0		
				Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi (Orang)	14 5		0		23		0		15		0		23		23		23		15.86	0		
		1.06.04.1.03.000 2	Penyediaan Sandang			428.080		-		100.00 0		-		39.944		-		49.752		89.696		89.696	15.86	20.95			
			Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi (Orang)	14 5		0		23		0		15		0		23		23		23		15.86	0			
			Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi (Orang)	14 5		0		23		16		15		22		23		23		23		15.86	0			

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%		
		1.06.04.1.03.00 03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses			6.559.538		-		169.911		117.647		3.225		6.521		37.261		164.653		164.653	15.86	2.51		
			Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi (Orang)	145		0		23		16		15		22		23		23		23		15.86	0		
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi (Orang)	33		0		23		0		0		0		23		23		23		69.7	0		
		1.06.04.1.03.00 05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial			20.404		-		4.000		-		-		-		4.000		4.000		4.000	69.7	19.6		
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi (Orang)	33		0		23		0		0		0		23		23		23		69.7	0		
			Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Orang)	145		0		23		16		15		22		23		23		23		15.86	0		
		1.06.04.1.03.00 06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial			966.798		-		192.609		11.389		282		15.354		158.155		185.180		185.180	15.86	19.15		
			Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Orang)	145		0		23		16		15		22		23		23		23		15.86	0		
			Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi (Orang)	145		0		23		16		15		22		23		23		23		15.86	0		
		1.06.04.1.03.00 07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			1.249.007		-		323.778		49.220		78.563		90.533		104.883		323.199		323.199	15.86	25.88		
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi (Orang)	145		0		23		16		15		22		23		23		23		15.86	0			

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%		
		1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti			302.492		-		325.916		15.840		26.402		127.034		155.817		325.093		325.093	20	107.47		
			Terlaksananya Koordinasi Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA (Dokumen)	5		0	1		0	0	1		1		1		1		1		20	0			
		1.06.04.1.05.011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA			302.492		-		325.916		15.840		26.402		127.034		155.817		325.093		325.093	20	107.47		
			Terlaksananya Koordinasi Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA (Dokumen)	5		0	1		0	0	1		1		1		1		1		20	0			
		1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			1.117.485		-		5.577.581		130.179		540.890		2.773.168		1.946.911		5.391.147		5.391.147	17.26	482.44	Dinas Sosial	
			Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase (%) ketepatan sasaran penerima program (%)		0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (Persentase)		11,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin (%)		500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)		20,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Jumlah fakir miskin yang mampu mengembangkan bantuan stimulan (org)			0	20	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%		
		1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal			567.951		-		91.659		7.348		6.028		-		72.481		85.857		85.857	30.53	15.12		
			Terlaksananya Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Asuh/Oang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi (Orang)	95		0		10		0		0		0		29		29		29		30.53	0		
		1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI			567.951		-		91.659		7.348		6.028		-		72.481		85.857		85.857	30.53	15.12		
			Terlaksananya Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Asuh/Oang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi (Orang)	95		0		10		0		0		0		29		29		29		30.53	0		
		1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi			549.535		-		5.485.922		122.831		534.862		2.773.168		1.874.429		5.305.290		5.305.290	4	965.42		
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi (Keluarga)	0		0		15000		0		0		9.000		0		9.000		9.000		0	0		
				Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kot a (Keluarga)	0		0		145		0		145		0		592		737		737		0	0		
				Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi (Orang)	150		0		6		0		0		0		6		6		6		4	0		
		1.06.05.1.02.0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			-		-		3.007.274		38.809		105.433		2.665.330		122.185		2.931.757		2.931.757	0	0		

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%		
				Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah provinsi (%)	500		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0		
		1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi			4.960.921		-		1.171.423		361.382		126.803		80.673		295.714		864.573		864.573	7.95	17.43		
			Tersedianya Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi (Orang)	0		0		500		0		0		0		930		930		930		0	0		
				Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi (Unit)	0		0		1		6		0		0		0		6		6		0	0		
		1.06.06.1.01.00 02	Penyediaan Sandang			-		-		245.000		-		-		-		199.407		199.407		199.407	0	0		
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi (Orang)	0		0		500		0		0		0		930		930		930		0	0		
		1.06.06.1.01.00 03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi			-		-		140.000		-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi (Unit)	0		0		1		6		0		0		0		6		6		0	0		
			Terpenuhinya Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi (Orang)	12700		0		1300		6.029		444		0		186		186		186		1.46	0		
		1.06.06.1.01.00 01	Penyediaan Permakanan			4.528.843		-		697.553		317.497		122.866		77.149		93.907		611.419		611.419	1.46	13.5		

[illegible]

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%		
				Persentase Taman Makam Pahlawan yang mening kat peran dan fungsi nya dalam penanaman dan pelest arian nilai-nilai kepahlawan-an, keperin tisan, keju angan dan kesetiakawan an sosial (%)			0		100		2,93		17		37		38		94,93		94,93		0	0		
		1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi			2.597.517		-		453.767		13.280		75.743		167.272		173.968		430.264		430.264	10	16.56		
			Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi (Makam)	10		0		2		0		0		1		1		1		1		10	0		
		1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi			2.597.517		-		453.767		13.280		75.743		167.272		173.968		430.264		430.264	10	16.56		
			Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi (Makam)	10		0		2		0		0		1		1		1		1		10	0		
																						0	0			
		JUMLAH				81,457,013		0		22,897,897		3,660,812		4,117,302		6,957,079		6,389,300		21,124,492		21,124,492				
		Rata-rata capaian kinerja (%)																				26.21	25.93			
		Predikat kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			

Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Gorontalo
BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi Tahun Berjalan Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi yang di Evaluasi		Unit SKPD Penanggu ng Jawab	Ket
						I		II		III		IV					
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		100.0 0	92,020,000.0 0	41.0 0	37,771,360. 00	30.0 0	27,871,575. 00	10.0 0	8,920,200.0 0	19.00	17,163,900. 00	100.0 0	91,727,035.0 0		
			Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100.0 0		41.0 0	-	30.0 0	-	10.0 0	-	19.00	-	100.0 0	-		
	2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan		100.0 0	92,020,000	41.0 0	37,771,360. 00	30.0 0	27,871,575. 00	10.0 0	8,920,200.0 0	19.00	17,163,900. 00	100.0 0	91,727,035.0 0		
			Persentase Penyelenggara an Pendaftaran Penduduk	100.0 0		41.0 0	-	30.0 0	-	10.0 0	-	19.00	-	100.0 0	-		
	2.12.02.1.02.00 04	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk		100.0 0	92,020,000.0 0	-	37,771,360. 00	-	27,871,575. 00	-	8,920,200.0 0	100.0 0	17,163,900. 00	100.0 0	91,727,035.0 0		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pendaftaran Penduduk	1.00		-	-	-	-	-	-	100.0 0	-	100.0 0	-		
2	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		100.0 0	111,332,000. 00	27.0 0	29,915,496. 00	10.0 0	11,784,300. 00	34.0 0	37,710,100. 00	29.00	29,571,800. 00	100.0 0	108,981,696. 00		
			Persentase Terwujudnya Pelayanan Pencatatan Sipil	100.0 0		27.0 0	-	10.0 0	-	34.0 0	-	29.00	-	100.0 0	-		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi Tahun Berjalan Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi yang di Evaluasi		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
						I		II		III		IV					
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		100.0 0	111,332,000	27.0 0	29,915,496. 00	10.0 0	11,784,300. 00	34.0 0	37,710,100. 00	29.00	29,571,800. 00	100.0 0	108,981,696. 00		
			Persentase Terlaksananny a Konsultasi Penyelenggara an Pencatatan Sipil	100.0 0		27.0 0	-	10.0 0	-	34.0 0	-	29.00	-	100.0 0	-		
	2.12.03.1.03.00 01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil		100.0 0	111,332,000. 00	-	29,915,496. 00	-	11,784,300. 00	-	37,710,100. 00	100.0 0	29,571,800. 00	100.0 0	108,981,696. 00		
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	1.00		-	-	-	-	-	-	100.0 0	-	100.0 0	-		
3	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		100.0 0	225,582,000. 00	33.0 0	75,093,760. 00	36.0 0	80,659,320. 00	24.0 0	53,270,585. 00	32.00	14,283,800. 00	125.0 0	223,307,465. 00		
			Persentase sarana dan prasarana pengelola administrasi kependudukan	100.0 0		33.0 0	-	36.0 0	-	24.0 0	-	32.00	-	125.0 0	-		
	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		100.0 0	122,376,000	35.0 0	42,832,700. 00	17.0 0	20,185,000. 00	36.0 0	44,591,700. 00	12.00	12,540,600. 00	100.0 0	120,150,000. 00		
			Persentase Sarana dan Prasarana Pengelola Administrasi Kependudukan	100.0 0		35.0 0	-	17.0 0	-	36.0 0	-	12.00	-	100.0 0	-		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi Tahun Berjalan Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi yang di Evaluasi		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
						I		II		III		IV					
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2.12.04.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		100.00	122,376,000.00	-	42,832,700.00	-	20,185,000.00	-	44,591,700.00	100.00	12,540,600.00	100.00	120,150,000.00		
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1.00		-	-	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-		
	2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		100.00	103,206,000	31.00	32,261,060.00	59.00	60,474,320.00	8.00	8,678,885.00	52.00	1,743,200.00	150.00	103,157,465.00		
			Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	100.00		31.00	-	59.00	-	8.00	-	52.00	-	150.00	-		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi Tahun Berjalan Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi yang di Evaluasi		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
						I		II		III		IV					
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2.12.04.1.03.0002	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan		100.00	103,206,000.00	-	32,261,060.00	100.00	60,474,320.00	-	8,678,885.00	50.00	1,743,200.00	150.00	103,157,465.00		
			Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	20.00		-	-	100.00	-	-	-	50.00	-	150.00	-		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					428,934,000.00	101.00	142,780,616.00	76.00	120,315,195.00	68.00	99,900,885.00	80.00	61,019,500.00	325.00	424,016,196.00		

2.2 Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025

Untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) selama periode Tahun 2023–2025, berikut disajikan capaian masing-masing indikator pelayanan dasar berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Penyajian data ini dimaksudkan untuk menunjukkan perkembangan capaian dari tahun ke tahun, membandingkan antara target dan realisasi, serta mengidentifikasi indikator yang telah memenuhi standar maupun yang masih memerlukan peningkatan kinerja.

Secara umum Capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025
Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Gorontalo

No	Jenis Layanan	Realisasi Tahun 2023		Realisasi Tahun 2024		Realisasi Tahun 2025		Keterangan
		Persentase	Jumlah Sasaran Yang dilayani	Persentase	Jumlah Sasaran Yang dilayani	Persentase	Jumlah Sasaran Yang dilayani	
1	2	9		10	11	11	13	
	URUSAN SOSIAL							
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar didalam panti	81,82 %	15	96,36 %	4	98,91%	9	
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam panti	83,33 %	60	100 %	52	100 %	45	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar didalam panti	98,33 %	23	100 %	23	100%	23	
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis didalam panti	0	0	100%	0	90%	5	
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	88,00%	2046	96,00 %	54198	97,85%	6659	

Hasil evaluasi penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial Provinsi Gorontalo selama periode 2023–2025 menunjukkan bahwa secara umum capaian pelayanan dasar mengalami peningkatan yang signifikan :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti

Capaian pelayanan meningkat dari 81,82% pada tahun 2023 menjadi 96,36% pada tahun 2024 dan 98,91% pada tahun 2025. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh perubahan pola pelayanan. Pada tahun 2023 pelayanan rehabilitasi sosial masih dilaksanakan kepada penyandang disabilitas di luar panti sehingga belum sepenuhnya memenuhi indikator SPM. Sejak tahun 2024 Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menyewa gedung yang digunakan sebagai panti pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar sehingga pelayanan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan SPM.

Meskipun capaian telah mencapai 98,91%, masih terdapat gap pelayanan sebesar 1,09%. Hal ini menunjukkan masih adanya sasaran yang belum memperoleh pelayanan secara optimal akibat keterbatasan kapasitas layanan dan sarana prasarana panti.

2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti

Capaian pelayanan meningkat dari 83,33% pada tahun 2023 menjadi 100% pada tahun 2024 dan tetap 100% pada tahun 2025. Keberhasilan tersebut didukung oleh kerja sama dengan LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) milik masyarakat, sehingga seluruh sasaran pelayanan dapat memperoleh layanan rehabilitasi sosial sesuai standar.

Kerja sama dengan LKSA menjadi faktor utama yang mendukung tercapainya target SPM karena mampu memperluas jangkauan pelayanan tanpa harus menambah fasilitas milik pemerintah daerah.

3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti

Capaian pelayanan meningkat dari 98,33% pada tahun 2023 menjadi 100% pada tahun 2024 dan tetap 100% pada tahun 2025. Capaian tersebut dapat dipertahankan karena Pemerintah Provinsi Gorontalo masih menyewa gedung sebagai tempat pelayanan rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar di dalam panti.

Penyediaan gedung sebagai tempat pelayanan mampu memenuhi kebutuhan layanan bagi seluruh sasaran lanjut usia terlantar. Namun demikian, penggunaan gedung sewa masih menjadi tantangan bagi keberlanjutan pelayanan.

4. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti

Capaian pelayanan menunjukkan perkembangan yang fluktuatif, yaitu 0% pada tahun 2023, 100% pada tahun 2024, dan 90% pada tahun 2025. Kondisi ini dipengaruhi oleh belum tersedianya panti sosial khusus gelandangan dan pengemis yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Gorontalo, sebagaimana dibuktikan dengan surat keterangan tidak memiliki panti.

Belum tersedianya sarana pelayanan menyebabkan pelayanan belum dapat diberikan secara optimal kepada seluruh sasaran sehingga masih terdapat gap pelayanan sebesar 10%.

5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana

Capaian pelayanan meningkat dari 88,00% pada tahun 2023 menjadi 96,00% pada tahun 2024 dan 97,85% pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan semakin baiknya penyelenggaraan pelayanan dasar bagi korban bencana melalui penyediaan bantuan kebutuhan dasar pada masa tanggap darurat maupun pascabencana.

Meskipun capaian sudah tinggi, masih terdapat gap pelayanan sebesar 2,15% yang dipengaruhi oleh dinamika kejadian bencana, akses menuju lokasi terdampak, serta keterbatasan logistik dan sumber daya saat terjadi keadaan darurat.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang memerlukan perhatian sebagai upaya mencapai target SPM sebesar 100% pada seluruh jenis layanan :

- A. Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan masih menjadi tantangan utama, terutama belum tersedianya Panti Sosial Terpadu milik Pemerintah Provinsi yang dapat memberikan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), meliputi gelandangan dan pengemis, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta penyandang disabilitas terlantar. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan pelayanan

masih mengandalkan kerja sama dengan lembaga kesejahteraan sosial maupun penyewaan gedung, sehingga keberlanjutan dan kapasitas pelayanan belum optimal.

- B. Kapasitas layanan dan dukungan pendanaan masih perlu ditingkatkan agar seluruh sasaran pelayanan dapat terpenuhi sesuai Standar Pelayanan Minimal. Peningkatan alokasi anggaran diperlukan untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana, operasional pelayanan, pemenuhan kebutuhan dasar penerima manfaat, serta pengembangan kualitas layanan sehingga seluruh indikator SPM dapat mencapai target 100%.
- C. Keberhasilan penyelenggaraan SPM juga memerlukan ketersediaan tenaga/SDM yang kompeten dan terlatih. Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan peningkatan kemampuan teknis di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, serta penanganan kedaruratan sosial menjadi faktor penting untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
- D. Diperlukan koordinasi dan harmonisasi yang lebih intensif antara Dinas Sosial Provinsi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota serta Pemerintah Pusat. Sinergi tersebut diperlukan dalam pemutakhiran data sasaran PPKS, penyelenggaraan layanan rujukan, pemanfaatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Sosial, penyediaan sarana dan prasarana, serta sinkronisasi program dan pendanaan agar pelaksanaan SPM berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.
- E. Meningkatkan kesiapsiagaan bencana, memperkuat ketersediaan buffer stock logistik, mempercepat distribusi bantuan, meningkatkan koordinasi lintas sektor, dan menambah dukungan pendanaan SPM.

2.3 Rumusan permasalahan dan isu strategis tahun 2027 berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2027 dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, dan kondisi lingkungan dinamis.

Rumusan permasalahan dan isu strategis merupakan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo Tahun 2027. Perumusan dilakukan melalui telaahan terhadap Renstra Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2029, arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2027, hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025, serta memperhatikan perkembangan kondisi lingkungan strategis baik pada tingkat nasional maupun daerah.

Berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, pembangunan urusan sosial diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui penguatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan korban bencana, serta penguatan tata kelola Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sementara itu, pada urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, perluasan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik, percepatan transformasi digital, serta penguatan tata kelola administrasi kependudukan yang terpadu dan berkelanjutan.

Selain memperhatikan dokumen perencanaan, dinamika lingkungan strategis juga menjadi faktor yang memengaruhi penyusunan Renja Tahun 2027. Perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat, perkembangan teknologi informasi, meningkatnya kebutuhan pelayanan publik yang cepat dan terintegrasi, perubahan regulasi nasional, serta tuntutan reformasi birokrasi mendorong perangkat daerah untuk terus melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan. Di sisi lain, meningkatnya potensi bencana, perubahan struktur demografi penduduk, mobilitas masyarakat, serta kebutuhan akan data sosial dan data kependudukan yang akurat menjadi tantangan yang harus diantisipasi melalui perencanaan yang adaptif dan berbasis data.

Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, rumusan permasalahan utama dan isu strategis yang menjadi perhatian Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo pada Tahun 2027 meliputi :

No	Kondisi Saat ini/Data	Permasalahan	Akar Masalah	Isu Strategis
Urusan Sosial				
1	Cakupan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS dan masyarakat miskin belum menjangkau seluruh sasaran sesuai hasil pemutakhiran data sosial.	Masih terdapat masyarakat miskin dan PPKS yang belum memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan.	Validitas dan pemutakhiran data belum konsisten, keterbatasan anggaran, serta belum optimalnya sinergi lintas sektor.	Peningkatan efektivitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial berbasis data yang akurat dan terpadu.
2	Cakupan perlindungan dan jaminan sosial belum sepenuhnya menjangkau kelompok rentan pada kondisi tertentu.	Sebagian masyarakat rentan belum memperoleh perlindungan sosial secara tepat sasaran dan tepat waktu.	Keterbatasan pendanaan, perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan belum optimalnya integrasi data penerima manfaat.	Penguatan sistem perlindungan dan jaminan sosial yang adaptif dan tepat sasaran.
3	Capaian SPM rehabilitasi sosial masih menyisakan gap pelayanan pada beberapa jenis layanan serta belum tersedia Panti Sosial Terpadu milik pemerintah provinsi.	Pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti bagi penyandang disabilitas terlantar, gelandangan dan pengemis, anak terlantar, serta lanjut usia terlantar belum dapat dilaksanakan secara maksimal.	Keterbatasan sarana dan prasarana, kapasitas SDM, serta dukungan pendanaan.	Penguatan kapasitas layanan rehabilitasi sosial dan pemenuhan sarana prasarana pelayanan.
4	Capaian pelayanan perlindungan korban bencana meningkat namun belum mencapai 100% sesuai target SPM.	Masih terdapat korban bencana yang belum memperoleh pelayanan kebutuhan dasar secara cepat dan menyeluruh.	Keterbatasan logistik, akses wilayah terdampak, kapasitas SDM kebencanaan, dan koordinasi lintas sektor.	Peningkatan kesiapsiagaan dan kapasitas perlindungan sosial korban bencana.
5	Data sosial dan data sosial ekonomi masih berasal dari berbagai sumber dengan tingkat pemutakhiran yang berbeda.	Akurasi dan integrasi data sosial belum sepenuhnya mendukung perencanaan, penganggaran dan penyaluran bantuan sosial.	Belum terintegrasinya sistem informasi, kapasitas pengelola data yang belum merata, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal.	Penguatan tata kelola data sosial yang terintegrasi dan berkualitas.
Urusan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
1	Masih terdapat penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan lengkap sesuai target nasional.	Cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan belum merata pada seluruh kelompok masyarakat.	Kesadaran masyarakat masih rendah, keterbatasan akses pelayanan pada wilayah tertentu, dan keterbatasan SDM pelayanan.	Peningkatan cakupan pelayanan administrasi kependudukan yang inklusif dan berkualitas.
2	Pelayanan administrasi kependudukan secara digital belum dimanfaatkan secara merata di seluruh kabupaten/kota.	Transformasi digital pelayanan belum berjalan secara optimal sehingga sebagian masyarakat masih bergantung pada	Infrastruktur TIK belum merata, kompetensi SDM, serta literasi digital masyarakat masih terbatas.	Percepatan transformasi digital pelayanan administrasi kependudukan.

		elayanan		
3	Pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah dalam perencanaan pembangunan masih terbatas.	Data kependudukan belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah.	Belum seluruh OPD memanfaatkan data kependudukan secara terintegrasi dan berkelanjutan.	Optimalisasi pemanfaatan data kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis data.
4	Integrasi data kependudukan dengan sistem informasi sektoral belum sepenuhnya terwujud.	Masih terjadi perbedaan data antarinstansi yang memengaruhi kualitas pelayanan publik.	Interoperabilitas sistem informasi belum optimal serta belum adanya integrasi data secara menyeluruh.	Penguatan tata kelola data kependudukan yang terintegrasi dan interoperabel.
5	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi kependudukan di kabupaten/kota belum merata.	Kualitas pelayanan administrasi kependudukan antar kabupaten/kota masih bervariasi.	Perbedaan kapasitas SDM, sarana prasarana, dan intensitas pembinaan.	Penguatan pembinaan, pengawasan dan peningkatan kapasitas penyelenggara administrasi

2.3.1 RKPD Tahun 2027

RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2027 menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas pelayanan publik, transformasi digital pemerintahan, serta penguatan tata kelola pemerintahan sebagai prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu, Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan tersebut melalui penyelenggaraan pelayanan sosial dan administrasi kependudukan yang berkualitas, inklusif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dalam proses penyusunan Rencana Kerja dilakukan analisa kebutuhan terhadap masing-masing Bidang sehingga didapat usulan kegiatan yang sesuai dengan kewenangan. Usulan yang diberikan oleh Bidang-bidang tersebut setelah dilakukan inventarisasi tidak ditemukan kegiatan baru dan perubahan nomenklatur kegiatan dan telah sesuai dengan Kepmendagri Nomor 900.1 - 861 Tahun 2026

RKPD sesuai dengan kebutuhan anggaran pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo sebagaimana pada tabel T-C.31 berikut :

Tabel T-C.31
Review terhadap RKPD Tahun 2027
Provinsi Gorontalo

Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil				20,388,991,460.00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil				21,266,289,112.00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				19,600,588,916.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				20,534,908,112.00	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				12,899,432,162.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				12,677,916,248.00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				467,020,000.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				459,193,000.00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	467,020,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dok	459,193,000.00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10,708,136,549.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10,701,805,306.00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Gorontalo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/Bulan	10,585,111,306.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Gorontalo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 org/bln	10,585,111,306.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	123,025,243.00	Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dok	116,694,000.00	

NO	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				53,978,000.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				89,162,000.00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi Gorontalo	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	53,978,000.00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi Gorontalo	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Org	68,812,000.00	
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Provinsi Gorontalo	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	73 Paket	20,350,000.00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				750,707,841.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah				620,492,284.00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Gorontalo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	750,707,841.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Gorontalo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	620,492,284.00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				919,589,772.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				749,893,000.00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	919,589,772.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	749,893,000.00	
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				503,008,544.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				931,970,544.00	
	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				56,088,000.00	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				56,088,000.00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	6 Dok	56,088,000.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	6 Dok	56,088,000.00	

NO	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi				446,920,544.00	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi				875,882,544.00	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	77 Keluarga	446,920,544.00	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	77 Keluarga	875,882,544.00	
3.	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				89,180,000.00	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				89,872,000.00	
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal				89,180,000.00	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal				89,872,000.00	
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	15 Orang	89,180,000.00	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	15 Org	89,872,000.00	

NO	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				2,831,155,218.00	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				3,070,828,828.00	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti				411,032,505.00	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti				410,972,516.00	
	Penyediaan Permakanan	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	14 Orang	191,652,000.00	Penyediaan Permakanan	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	12 Org	173,128,000.00	
	Penyediaan Sandang	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	14 Orang	15,000,000.00	Penyediaan Sandang	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	12 Org	15,000,000.00	
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	14 Orang	6,960,000.00	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	12 Org	12,574,200.00	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	14 Orang	4,000,000.00	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	12 Org	4,000,000.00	
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	14 Orang	155,582,316.00	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	12 Org	179,038,316.00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pemulasaraan	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	1 orang	10,000,000.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	1 Dok	27,232,000.00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	1 Dok	27,838,189.00						
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				1,083,337,000.00	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				1,029,451,000.00	
	Penyediaan Permakanan	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	55 Orang	864,450,000.00	Penyediaan Permakanan	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	55 Org	773,200,000.00	
	Penyediaan Sandang	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	55 Orang	75,000,000.00	Penyediaan Sandang	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	55 Org	75,000,000.00	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	55 Orang	4,000,000.00	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	55 Org	-	
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	55 Orang	5,000,000.00	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	55 Org	17,944,000.00	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	55 Orang	38,672,000.00	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	55 Org	31,653,000.00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	55 Orang	38,672,000.00	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	55 Org	31,653,000.00	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1 Dok	96,215,000.00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1 dok	127,654,000.00	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti				909,027,719.00	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti				1,136,168,568.00	
	Penyediaan Permakanan	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	27 Orang	410,475,000.00	Penyediaan Permakanan	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	27 Org	383,890,000.00	
	Penyediaan sandang	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	27 Orang	39,999,000.00	Penyediaan sandang	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	27 Org	34,500,000.00	
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	27 Orang	18,426,175.00	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	27 Org	167,453,796.00	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	27 Orang	4,000,000.00	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	27 Org	4,000,000.00	
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	27 Orang	320,681,544.00	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	27 Org	319,520,772.00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	27 Orang	55,898,000.00	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	27 Org	122,732,000.00	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	27 Orang	20,520,000.00	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	27 Org	23,534,000.00	
	Pemulasaraan	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	4 Orang	10,000,000.00	Pemulasaraan	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	4 Org	20,000,000.00	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	1 Dok	29,028,000.00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	1 Dok	54,538,000.00	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti				322,817,994.00	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti				389,290,744.00	
	Penyediaan Permakanan	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	12 Org	98,832,000.00	Penyediaan Permakanan	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	12 Org	89,832,000.00	
	Penyediaan Sandang	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	12 Org	15,000,000.00	Penyediaan Sandang	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	12 Org	15,000,000.00	
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	12 Org	67,778,000.00	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	12 Org	140,721,200.00	
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	12 Org	116,921,544.00	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	12 Org	9,080,000.00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	12 Org	9,360,000.00	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	12 Org	123,237,544.00	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	1 Dok	14,926,450.00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	1 Dok	11,420,000.00	
	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti				104,940,000.00	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti				104,956,000.00	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	1 Dok	104,940,000.00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	1 Dok	104,956,000.00	
5.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				1,966,544,272.00	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				2,441,331,772.00	
	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal				29,916,000.00	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal				67,275,000.00	
	Pengangkatan Anak antar WNI	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	18 Orang	29,916,000.00	Pengangkatan Anak antar WNI	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi		67,275,000.00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi				1,936,628,272.00	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi				2,374,056,772.00	
	Fasilitasi Bantuan Stimulan Modal Usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha lintas daerah kabupaten/kota	600 Orang	1,117,645,772.00	Fasilitasi Bantuan Stimulan Modal Usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha lintas daerah kabupaten/kota	600 Org	1,207,846,772.00	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	4300 Orang	818,982,500.00	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	4300 Org	1,166,210,000.00	
6.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				1,030,955,632.00	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				1,017,665,632.00	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi				1,030,955,632.00	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi				1,017,665,632.00	
	Penyediaan Permakanan	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	2300 Orang	983,702,232.00	Penyediaan Permakanan	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	2300 Org	970,075,632.00	
	Penyediaan Sandang	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	1000 Orang	5,000,000.00	Penyediaan Sandang	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	1000 Org	5,000,000.00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	1 Orang	7,253,400.00	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	100 Org	7,590,000.00	
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	100 Orang	27,500,000.00	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	100 Org	27,500,000.00	
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	100 Orang	7,500,000.00	Pelayanan Dukungan Psikososial	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	100 Org	7,500,000.00	
7.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				280,313,088.00	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				305,313,088.00	
	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				280,313,088.00	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				305,313,088.00	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	2 Makam	280,313,088.00	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	2 Makam	305,313,088.00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				788,402,544.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				731,381,000.00	
8.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				308,765,544.00	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				465,584,000.00	
	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan				308,765,544.00	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan				465,584,000.00	
	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	308,765,544.00	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	465,584,000.00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
9.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL				197,704,000.00	PROGRAM PENCATATAN SIPIL				76,264,000.00	
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi					Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi				76,264,000.00	
	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	197,704,000.00	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil		76,264,000.00	
10.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				103,206,000.00	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				103,206,000.00	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi				103,206,000.00	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi				103,206,000.00	
	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	30 Orang	103,206,000.00	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	30 Org	103,206,000.00	
11.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				178,727,000.00	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				86,327,000.00	
	Penyediaan Profil Kependudukan				178,727,000.00	Penyediaan Profil Kependudukan				86,327,000.00	
	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia	1 Dok	178,727,000.00	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia	1 Dok	86,327,000.00	

2.4 Telaah Pokok-pokok Pikiran DPRD

Program dan kegiatan yang berasal dari pokok-pokok pikiran DPRD maupun usulan pemangku kepentingan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan hasil kajian yang disampaikan melalui pendekatan perencanaan partisipatif (*bottom-up planning*). Usulan tersebut berasal dari kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, perguruan tinggi, pemerintah kabupaten/kota, hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), reses DPRD, serta hasil identifikasi kebutuhan masyarakat yang dihimpun oleh Perangkat Daerah.

Selanjutnya dilakukan penelaahan terhadap setiap usulan untuk memastikan kesesuaiannya dengan isu strategis, sasaran pembangunan daerah, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah, serta ketersediaan kemampuan keuangan daerah. Selain itu, setiap usulan dianalisis berdasarkan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan agar program dan kegiatan yang diakomodasi sesuai dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Penelaahan usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo dilakukan dengan memperhatikan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Kesesuaian dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 34 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
2. Kesesuaian dengan arah kebijakan, strategi, program prioritas, serta target pembangunan daerah dalam RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2029 dan RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2027.
3. Kesesuaian dengan pembagian kewenangan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya dan ketentuan pelaksanaannya. Usulan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi diprioritaskan untuk diakomodasi dalam Renja Perangkat Daerah, sedangkan usulan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kabupaten/Kota

dikoordinasikan dan disinergikan melalui mekanisme perencanaan sesuai kewenangan masing-masing.

4. Kesesuaian usulan dengan indikator kinerja, target kinerja, serta prinsip penyusunan program dan kegiatan yang berorientasi pada hasil (*outcome*) sesuai dengan ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
5. Ketersediaan data dukung, tingkat urgensi, jumlah sasaran penerima manfaat, serta kemampuan pendanaan daerah sehingga usulan yang diakomodasi memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelaahan tersebut, usulan program dan kegiatan yang memenuhi kriteria kewenangan Pemerintah Provinsi, mendukung pencapaian target pembangunan daerah, serta selaras dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo diakomodasi dalam Rencana Kerja Tahun 2027 sebagaimana disajikan pada Tabel T-B.57 sebagai berikut :

Tabel T-B.57
Rumusan Usulan Program/Kegiatan
Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Validasi
Provinsi Gorontalo

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi / Keterangan
1	2	3	3	5	6	
II.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial					
II.1.	Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi					
II.1.2	Sub Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Stimulan Modal Usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha lintas daerah kabupaten/kota	95 KPM	Kab/Kota	Dinas Sosial Kab/kota se-Provinsi Gorontalo	Diterima dan diakomodir sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Tahun Anggaran 2027

2.5 Inovasi bidang urusan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pada Tahun 2027, Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo terus mengembangkan inovasi yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan, percepatan proses layanan, pemanfaatan teknologi informasi, akurasi data, serta penguatan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat. Inovasi tersebut merupakan implementasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan transformasi digital dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Pengembangan inovasi diarahkan untuk menjawab berbagai tantangan pelayanan, antara lain masih terbatasnya akses masyarakat terhadap pelayanan sosial, belum optimalnya integrasi data penerima manfaat, serta meningkatnya kebutuhan akan pelayanan yang cepat, transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi.

A. Inovasi Digital Pelayanan Sosial melalui Aplikasi E-REHSOS

Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah E-REHSOS (Electronic Rehabilitation Social System), yaitu aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mendukung pengelolaan data penghuni lembaga kesejahteraan sosial secara terintegrasi.

Aplikasi ini mempermudah lembaga kesejahteraan sosial dalam melakukan pencatatan, pembaruan, dan pelaporan data penerima layanan kepada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo secara real time, sehingga proses pengelolaan data menjadi lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi dengan baik.

Data yang dikelola melalui aplikasi meliputi :

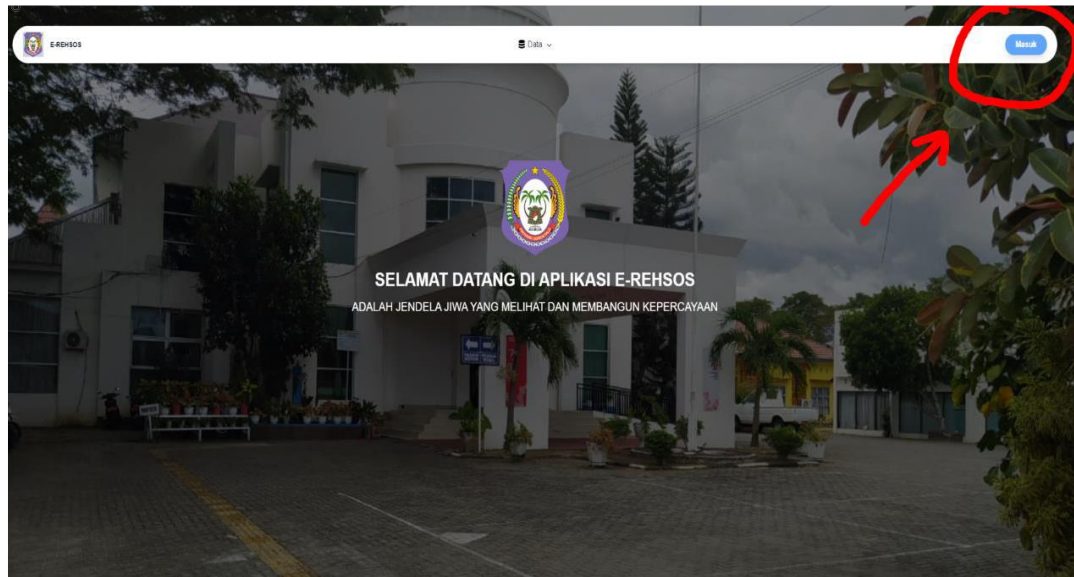
- Identitas penghuni;
- Kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- Riwayat pelayanan;
- Kondisi sosial;
- Perkembangan penerima manfaat;

- Status keluar atau rujukan pelayanan.

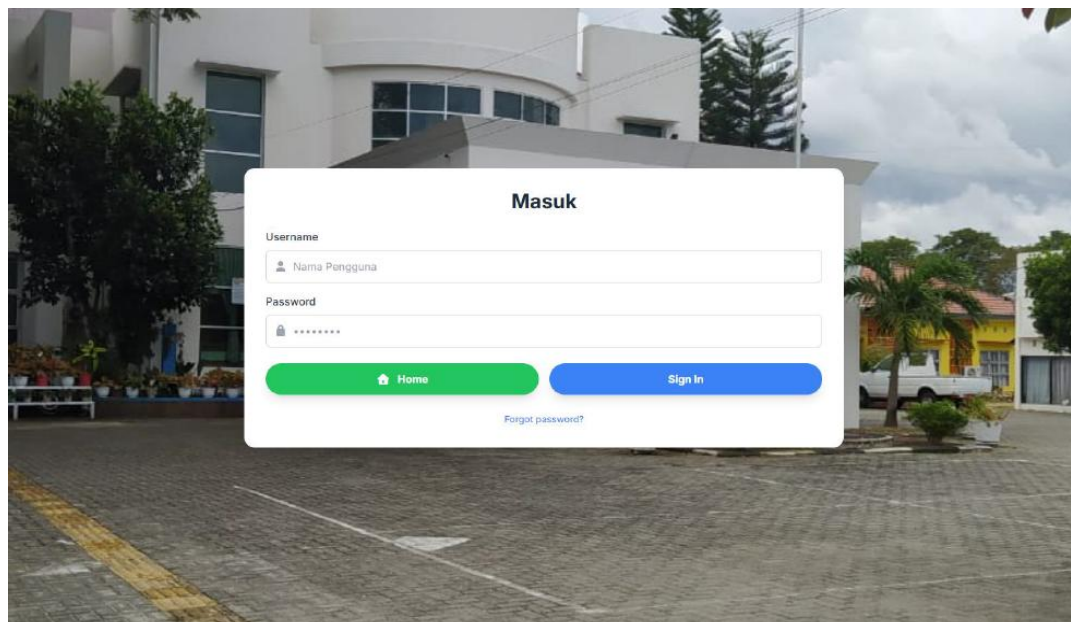
Dengan tersedianya data yang selalu diperbarui, Dinas Sosial dapat melakukan monitoring, evaluasi, penyusunan kebijakan, serta perencanaan program rehabilitasi sosial secara lebih tepat sasaran. Aplikasi E-REHSOS dapat diakses secara daring melalui <https://simata.gorontaloprov.go.id>

Gambar 2.5

Tampilan Aplikasi E-REHSOS



(Dashboard aplikasi E-REHSOS)



(Screenshot halaman login)

B. Inovasi Program Bantuan Sosial

Selain inovasi digital, Dinas Sosial juga mengembangkan inovasi program pemberdayaan ekonomi dan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan.

1. Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)/WRSE

Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) merupakan inovasi pemberdayaan sosial yang ditujukan kepada Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) atau Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) untuk meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga melalui pemberian bantuan modal usaha yang disertai pendampingan.

Melalui program ini, penerima manfaat tidak hanya memperoleh bantuan modal, tetapi juga pendampingan usaha, monitoring perkembangan usaha, serta pembinaan agar usaha dapat berkembang secara berkelanjutan.

Dokumentasi Penyaluran bantuan UEP



2. Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo (BLP3G)

Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo (BLP3G) merupakan salah satu inovasi Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial yang bertujuan membantu pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin dan rentan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Program BLP3G dilaksanakan sebagai bentuk intervensi daerah dalam mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan ketahanan pangan keluarga, serta memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok

rentan. Penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan data sasaran yang telah melalui proses verifikasi dan validasi sehingga bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran, tepat waktu, dan akuntabel.

Dokumentasi Penyaluran BLP3G



Pengembangan inovasi pelayanan melalui E-REHSOS, Program UEP bagi PEKKA/WRSE, dan Program BLP3G merupakan bentuk komitmen Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Inovasi tersebut mendukung digitalisasi pelayanan, meningkatkan akurasi data penerima manfaat, memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan, serta meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Berikut tujuan, sasaran dan pemanfaatan dari inovasi seperti tabel dibawah ini :

Tabel 2.5

No	Nama Inovasi	Tujuan	Sasaran	Mekanisme	Manfaat
1	E-REHSOS	Digitalisasi pengelolaan data rehabilitasi sosial	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Dinas Sosial	Input data → Verifikasi → Database → Monitoring	Data lebih cepat, akurat, dan terintegrasi
2	UEP/PEKKA (WRSE)	Pemberdayaan ekonomi keluarga miskin	Perempuan Kepala Keluarga/Wanita Rawan Sosial Ekonomi	Verifikasi → Penyaluran modal → Pendampingan → Monitoring	Meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga
3	BLP3G (Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo)	Perlindungan social melalui bantuan pangan	Masyarakat miskin dan rentan	Verifikasi data → Penetapan → Penyaluran → Monitoring	Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan ketahanan pangan keluarga

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo dalam kurun waktu pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027. Perumusan tujuan dilakukan dengan memperhatikan tugas dan fungsi perangkat daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, isu-isu strategis, serta arah kebijakan pembangunan daerah. Tujuan ini menjadi pedoman dalam mengarahkan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan agar pelaksanaan pembangunan pada urusan sosial, administrasi kependudukan, dan pencatatan sipil berjalan secara efektif, efisien, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. tujuannya yakni :

“Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat yang inklusif dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan serta pencatatan Sipil “

b. Sasaran.

Sasaran merupakan penjabaran yang lebih spesifik dari tujuan yang telah ditetapkan dan menggambarkan hasil yang akan dicapai melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan selama Tahun 2027. Sasaran dirumuskan secara terukur dengan menggunakan indikator kinerja dan target yang jelas sebagai dasar dalam pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Melalui penetapan sasaran yang tepat, diharapkan pelaksanaan urusan sosial, administrasi kependudukan, dan pencatatan sipil dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Adapun sasaran yang dicapai Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo selang tahun 2027 yaitu :

1. Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Masyarakat
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Pemanfaatan Data Kependudukan berbasis Digital.

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Baseline 2025	Target 2027		Dasar Analisis
					Renstra	Renja	
1.	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat yang inklusif dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan serta pencatatan Sipil		Indeks Kesejahteraan Sosial	51,92%	55,40%	54,80%	Disesuaikan dengan capaian 2025 dan proyeksi kemampuan pencapaian Tahun 2027
		Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Masyarakat	Persentase masyarakat rentan yang mendapatkan perlindungan sosial	45%	21,94%	23,00%	Dinaikkan karena realisasi tahun sebelumnya melampaui target dan didukung peningkatan cakupan layanan
		Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Pemanfaatan Data Kependudukan berbasis Digital.	Jumlah Daerah dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkategori "Sangat Baik"	N/A (Indikator baru)	1	1	Indikator baru yang mulai diterapkan pada periode Renstra Tahun 2025–2029, sehingga belum memiliki data baseline Tahun 2025. Oleh karena itu, penetapan target Renja Tahun 2027 tidak didasarkan pada capaian tahun sebelumnya, melainkan mengacu pada arah kebijakan Renstra, kondisi penyelenggaraan administrasi kependudukan di kabupaten/kota, hasil koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, serta proyeksi kemampuan pencapaian kinerja pada Tahun 2027. Target sebanyak 1 daerah ditetapkan sebagai target yang realistis dengan mempertimbangkan kesiapan pemerintah kabupaten/kota dalam memenuhi indikator penilaian Indeks Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selanjutnya, capaian indikator ini akan menjadi baseline untuk penyusunan target pada tahun-tahun berikutnya.

➤ **Analisis Penetapan Target Tujuan dan Sasaran Tahun 2027**

Penetapan target tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo Tahun 2027 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 sebagai baseline, capaian pelaksanaan Renja Tahun 2026, target yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2025–2029, arah kebijakan RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2027, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan dinamika permasalahan yang berkembang.

Hasil evaluasi Renja Tahun 2025 menunjukkan bahwa terdapat indikator yang telah mencapai bahkan melampaui target, namun terdapat pula indikator yang belum mencapai target secara optimal. Oleh karena itu, penetapan target Renja Tahun 2027 tidak semata-mata mengacu pada target Renstra, tetapi disusun berdasarkan analisis terhadap tren capaian kinerja, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta proyeksi kemampuan pencapaian pada Tahun 2027.

Dengan mempertimbangkan hasil evaluasi tersebut, target indikator dalam Renja Tahun 2027 dapat sama, lebih tinggi, maupun lebih rendah dibandingkan target Renstra Tahun 2025–2029, sepanjang didukung oleh analisis yang dapat dipertanggungjawabkan. Penyesuaian target dilakukan agar target kinerja lebih realistis, terukur, dan dapat dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung oleh ketersediaan anggaran, sumber daya manusia, serta kondisi aktual penyelenggaraan urusan pemerintahan.

3.2 Arah kebijakan yang sudah diselaraskan dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2027, RKPD Tahun 2027, dan kebijakan nasional/daerah lainnya.

Arah kebijakan Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo Tahun 2027 disusun sebagai penjabaran operasional Renstra Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2029 serta diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2027, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), serta kebijakan nasional dan daerah lainnya.

Hasil telaah menunjukkan bahwa terdapat beberapa arah kebijakan nasional dan daerah yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo, terutama dalam penyelenggaraan urusan sosial serta pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Adapun penyelarasannya sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2
Arah Kebijakan

Arah Kebijakan RKP Tahun 2027	Arah Kebijakan RKPD Tahun 2027	Arah Kebijakan Renja Tahun 2027	Hasil Telaah/Keterkaitan dengan Tupoksi Dinsosdukcapil
Penguatan Perencanaan berbasis bukti melalui SEPAKAT dan Data Terpadu	Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai baseline data sasaran penerima manfaat.	Penguatan data kesejahteraan sosial dan penanganan kemiskinan berbasis DTSEN	Sejalan dengan tugas Dinas dalam pengelolaan data PPKS, pelaksanaan verifikasi dan validasi data kesejahteraan sosial, serta pemanfaatan DTSEN sebagai dasar penetapan sasaran program rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan kemiskinan
Perlindungan Sosial Adaptif dan Inklusif	Pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial adaptif serta pemenuhan hak kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, anak terlantar, perempuan rentan sosial ekonomi).	Penguatan perlindungan sosial yang adaptif, terpadu, inklusif, dan tepat sasaran serta peningkatan kualitas pelayanan sosial.	Selaras dengan kewenangan Dinas dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanganan korban bencana, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial.
Penguatan pelayanan dasar dan pengurangan kemiskinan	Peningkatan kapasitas keluarga miskin serta peningkatan kesejahteraan kelompok rentan.	Penguatan pemberdayaan sosial dan peningkatan kapasitas keluarga miskin serta kelompok rentan.	Mendukung pelaksanaan program pemberdayaan sosial, bantuan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan keluarga miskin untuk meningkatkan keberfungsian sosial dan kemandirian ekonomi masyarakat.
Pemerintah Digital (SPBE)	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis digital.	Pengembangan tata kelola administrasi kependudukan berbasis digital dan terintegrasi.	Sesuai dengan tugas Dinas dalam pembinaan penyelenggaraan administrasi kependudukan, penguatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), Identitas Kependudukan Digital (IKD), dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, inklusif, dan akuntabel.	Penguatan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.	Berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi kependudukan kabupaten/kota, peningkatan kualitas pelayanan Dukcapil, serta peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan.
Pemanfaatan Data Pemerintahan Digital	Optimalisasi pemanfaatan data kependudukan dalam perencanaan pembangunan dan pelayanan publik.	Penguatan integrasi dan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik dan perencanaan pembangunan daerah.	Mendukung fungsi provinsi dalam pembinaan pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah dan kabupaten/kota sebagai dasar perencanaan, penyaluran bantuan sosial, serta penyelenggaraan pelayanan publik.
Penguatan kualitas SDM Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur dan tata kelola pemerintahan.	Penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan penyelenggara kesejahteraan sosial serta aparatur administrasi kependudukan.	Sejalan dengan tugas Dinas dalam meningkatkan kompetensi aparatur bidang sosial dan administrasi kependudukan melalui bimbingan teknis, pembinaan, monitoring, dan evaluasi kepada kabupaten/kota serta pilar-pilar sosial.

Arah kebijakan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, dan target kinerja Tahun 2027 sehingga pelaksanaan pembangunan pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo dapat berjalan secara terarah, terukur, dan mampu memberikan pelayanan yang semakin berkualitas kepada masyarakat.

3.2.1 Arah Kebijakan Dalam Mendukung Program Sekolah Rakyat

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Sekolah Rakyat sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan, Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo mengarahkan kebijakan pada penguatan sinergi pelayanan sosial, validasi data kependudukan, serta perlindungan hak sipil masyarakat. Arah kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sasaran Program Sekolah Rakyat tepat sasaran, memperoleh dukungan pelayanan yang terintegrasi, serta memiliki dokumen kependudukan yang menjadi dasar dalam memperoleh layanan pendidikan dan perlindungan sosial.

Dari aspek sosial, kebijakan difokuskan pada :

1. Identifikasi dan verifikasi calon peserta didik yang berasal dari keluarga miskin, miskin ekstrem, anak terlantar, anak yang memerlukan perlindungan khusus, penyandang disabilitas.
2. Kelompok rentan lainnya melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan hasil asesmen pekerja sosial.
3. Pendampingan sosial terhadap keluarga penerima manfaat untuk memastikan keberlangsungan pendidikan anak serta mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga.

Dari aspek administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, arah kebijakan diarahkan pada :

1. Percepatan kepemilikan dokumen kependudukan, seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta dokumen kependudukan lainnya yang menjadi persyaratan dalam akses layanan pendidikan.
2. Pelayanan administrasi kependudukan dilaksanakan melalui pendekatan jemput bola dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menjangkau masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan secara lengkap.
3. Pelaksanaan Program Sekolah Rakyat juga didukung melalui penguatan koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, perangkat daerah terkait, lembaga kesejahteraan sosial, serta pemangku kepentingan lainnya. Sinergi tersebut diarahkan untuk mendukung penyediaan data yang akurat, pelaksanaan pendampingan sosial, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program secara berkelanjutan.

Dengan arah kebijakan tersebut, Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo berkomitmen mendukung keberhasilan Program Sekolah Rakyat melalui penyediaan data yang valid, peningkatan akses terhadap dokumen kependudukan, pendampingan sosial kepada keluarga sasaran, serta penguatan kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan pelayanan yang inklusif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Sosial, Kependudukan Daerah merupakan penjabaran dari program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran sebagai upaya mewujudkan sasaran, tujuan, dan target kinerja yang telah ditetapkan. Penyusunan rencana kerja dan pendanaan dilakukan dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, prioritas pembangunan daerah, serta kemampuan keuangan daerah.

Rencana kerja dan pendanaan disusun berdasarkan kebutuhan riil pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan sinkronisasi antara target kinerja dengan alokasi anggaran. Selain itu, penyusunan rencana kerja juga mempertimbangkan dinamika pelaksanaan kegiatan, kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, serta hasil evaluasi capaian kinerja yang menjadi dasar dalam penyesuaian target dan pendanaan.

Selanjutnya, rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah memuat uraian mengenai program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target capaian, lokasi pelaksanaan, kelompok sasaran, serta kebutuhan pendanaan yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun anggaran berjalan. Rincian rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah disajikan pada tabel TC-33 berikut :

TABEL TC.33
PENETAPAN RENCANA KERJA DAN KEGIATAN
DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil						20,388,991,460.00							21,297,119,343.00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						19,600,588,916.00							20,847,119,343.00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						19,600,588,916.00							20,847,119,343.00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						12,899,432,162.00							11,169,095,496.00	
		Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100%	100%	100%	100%	12,899,432,162.00						100%	11,169,095,496.00	
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						467,020,000.00					Perangkat Daerah		589,617,800.00	
	1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						467,020,000.00							589,617,800.00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	467,020,000.00	Prov Gorontalo	Dana Alokasi Umum (DAU)		-		1 Dok	589,617,800.00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						10,708,136,549.00					ASN & Pegawai		9,059,834,726.00	
	1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						10,585,111,306.00							8,927,527,756.00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/ Bulan	69 Orang / Bulan	70 Orang/ Bulan	73 Orang/ Bulan	10,585,111,306.00	Prov Gorontalo	Dana Alokasi Umum (DAU)		-		76 Orang/ Bulan	8,927,527,756.00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1.06.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						123,025,243.00							132,306,970.00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	123,025,243.00	Prov Gorontalo	Dana Alokasi Umum (DAU)		-		1 Lap	132,306,970.00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						53,978,000.00					ASN & Pegawai		112,313,010.00	
	1.06.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						53,978,000.00							112,313,010.00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	26 Orang	10 Orang	10 Orang	53,978,000.00	Prov Gorontalo	Dana Alokasi Umum (DAU)		-		10 Orang	112,313,010.00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						750,707,841.00					Perangkat Daerah		546,059,530.00	
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						750,707,841.00							546,059,530.00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	750,707,841.00	Prov Gorontalo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Paket	546,059,530.00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	100%	100%	100%	100%							100%		
	1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						56,088,000.00							139,345,660.00	
	1.06.02.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang						56,088,000.00							139,345,660.00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	6 Dok	10 Dok	6 Dok	6 Dok	56,088,000.00	Provinsi Gorontalo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Badan Usaha, Perusahaan	6 Dok	139,345,660.00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi						446,920,544.00							816,080,000.00	
	1.06.02.1.02.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi						446,920,544.00							816,080,000.00	
		Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	77 Keluarga	77 Keluarga	77 Keluarga	14 Keluarga	446,920,544.00	Provinsi Gorontalo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Pekerja Sosial, TKSK, Penyuluh Sosial, Relawan Sosial, Lembaga Sosial dan Karang Taruna	77 Keluarga	816,080,000.00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN						89,180,000.00							148,667,888.00	
		Meningkatnya layanan penanganan Warga Negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	100%	31,25%	100%	100%	89,180,000.00						100%	148,667,888.00	
	1.06.03.1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal						89,180,000.00							148,667,888.00	
	1.06.03.1.01.0003	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal						89,180,000.00							148,667,888.00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	15 Orang	5 Orang	15 Orang	6 Orang	89,180,000.00	Provinsi Gorontalo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	-	Warga Negara Migran Indonesia	15 Orang	148,667,888.00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						2,831,155,218.00							2,762,430,800.00	
		Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%	98,91%	100%	100%	2,798,155,218.00						100%	2,762,430,800.00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti						411,032,505.00					PMKS / PPKS		462,105,300.00	
	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan						191,652,000.00							153,015,000.00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	20 Orang	25 Orang	12 Orang	14 Orang	191,652,000.00	Provinsi Gorontalo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	-	PMKS / PPKS	16 Orang	153,015,000.00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang						15,000,000.00							20,402,000.00	
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	20 Orang	5 Orang	12 Orang	14 Orang	15,000,000.00	Provinsi Gorontalo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	-	PMKS / PPKS	16 Orang	20,402,000.00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses						6,960,000.00							49,984,900.00	
		Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	20 Orang	5 Orang	12 Orang	14 Orang	6,960,000.00	Provinsi Gorontalo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	-	PMKS / PPKS	16 Orang	49,984,900.00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti						4,000,000.00							19,381,900.00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	20 Orang	5 Orang	12 Orang	14 Orang	4,000,000.00	Provinsi Gorontalo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	-		16 Orang	19,381,900.00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari						155,582,316.00							122,412,000.00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	20 Orang	5 Orang	12 Orang	14 Orang	155,582,316.00	Provinsi Gorontalo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	-		16 Orang	122,412,000.00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1.06.04.1.01.0019	Pemulasaraan						10,000,000.00							5,100,500.00	
		Terlaksananya Pemulasaraan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	1 orang	-	1 orang	2 orang	10,000,000.00	Provinsi Gorontalo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 orang	5,100,500.00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1.06.04.1.01.0021	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar						27,838,189.00							91,809,000.00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	27,838,189.00	Provinsi Gorontalo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	-		1 Dok	91,809,000.00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti						1,083,337,000.00					PMKS/PPKS		872,185,500.00	
	1.06.04.1.02.0015	Penyediaan Permakanan						864,450,000.00							510,050,000.00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	70 Orang	45 Orang	50 Orang	55 Orang	864,450,000.00	Provinsi Gorontalo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	-		60 Orang	510,050,000.00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang						75,000,000.00							45,904,500.00	
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	70 Orang	45 Orang	50 Orang	55 Orang	75,000,000.00	Provinsi Gorontalo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	-		60 Orang	45,904,500.00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti						4,000,000.00							10,201,000.00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	70 Orang	45 Orang	50 Orang	55 Orang	4,000,000.00	Provinsi Gorontalo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	-		60 Orang	10,201,000.00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial						38,672,000.00							40,804,000.00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	70 Orang	45 Orang	50 Orang	55 Orang	38,672,000.00	Provinsi Gorontalo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	-		60 Orang	40,804,000.00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari						5,000,000.00							91,809,000.00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	70 Orang	45 Orang	50 Orang	55 Orang	5,000,000.00	Provinsi Gorontalo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	-		60 Orang	91,809,000.00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.04.1.02.0017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti						96,215,000.00							173,417,000.00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	96,215,000.00	Provinsi Gorontalo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	-		1 Dok	173,417,000.00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti						909,027,719.00					PMKS/PPKS		1,178,215,500.00	
	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan						410,475,000.00							306,030,000.00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	33 Orang	55 orang	25 Orang	27 Orang	410,475,000.00	Provinsi Gorontalo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	-		29 Orang	306,030,000.00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang						39,999,000.00							81,608,000.00	
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	33 Orang	23 Orang	25 Orang	27 Orang	39,999,000.00	Provinsi Gorontalo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	-		29 Orang	81,608,000.00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses						18,426,175.00							153,015,000.00	
		Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	33 Orang	23 Orang	25 Orang	27 Orang	18,426,175.00	Provinsi Gorontalo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	-		29 Orang	153,015,000.00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial						4,000,000.00							24,482,400.00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	33 Orang	23 Orang	25 Orang	27 Orang	4,000,000.00	Provinsi Gorontalo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	-		29 Orang	24,482,400.00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial						55,898,000.00							188,718,500.00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	33 Orang	23 Orang	25 Orang	27 Orang	55,898,000.00	Provinsi Gorontalo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	-		29 Orang	188,718,500.00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari						320,681,544.00							224,422,000.00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	33 Orang	23 Orang	25 Orang	27 Orang	320,681,544.00	Provinsi Gorontalo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	-		29 Orang	224,422,000.00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga						20,520,000.00							71,407,000.00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	33 Orang	9 Orang	25 Orang	27 Orang	20,520,000.00	Provinsi Gorontalo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	-		29 Orang	71,407,000.00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan						10,000,000.00							20,402,000.00	
		Terlaksananya Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	4 Orang	2 Orang	4 Orang	4 Orang	10,000,000.00	Provinsi Gorontalo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	-		4 Orang	20,402,000.00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1.06.04.1.03.0017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti						29,028,000.00							102,010,000.00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dok	1 Dok	1 Dok	29,028,000.00	Provinsi Gorontalo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	-		1 Dok	102,010,000.00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti						322,817,994.00					PMKS/PPKS		209,120,500.00	
	1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan						98,832,000.00							71,407,000.00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	10 Orang	-	10 Orang	10 Orang	98,832,000.00	Provinsi Gorontalo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	-		10 Orang	71,407,000.00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1.06.04.1.04.0002	Penyediaan Sandang						15,000,000.00							10,201,000.00	
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	10 Orang	-	10 Orang	10 Orang	15,000,000.00	Provinsi Gorontalo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	-		10 Orang	10,201,000.00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.04.1.04.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses						67,778,000.00							51,005,000.00	
		Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	10 Orang	-	10 Orang	10 Orang	67,778,000.00	Provinsi Gorontalo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	-		10 Orang	51,005,000.00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1.06.04.1.04.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial						9,360,000.00							10,201,000.00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	10 Orang	-	10 Orang	10 Orang	9,360,000.00	Provinsi Gorontalo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	-		10 Orang	10,201,000.00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1.06.04.1.04.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari						116,921,544.00							30,603,000.00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	10 Orang	-	10 Orang	10 Orang	116,921,544.00	Provinsi Gorontalo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	-		10 Orang	30,603,000.00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1.06.04.1.04.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti						14,926,450.00							35,703,500.00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	1 Dok	-	1 Dok	1 Dok	14,926,450.00	Provinsi Gorontalo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	-		1 Dok	35,703,500.00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti						104,940,000.00					PMKS/PPKS		40,804,000.00	
	1.06.04.1.05.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA						104,940,000.00							40,804,000.00	
		Terlaksananya Koordinasi Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	104,940,000.00	Provinsi Gorontalo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	-		1 Dok	40,804,000.00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						1,966,544,272.00							3,950,745,290.00	
		Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	100%	100%	100%	100%	1,966,544,272.00						100%	3,950,745,290.00	
			Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	11,96%	11,75%	8,77%	9,57%							10,36%		
			Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	20,23%	36,42%	16,99%	17,4%							18,21%		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal						29,916,000.00					-		118,433,610.00	
	1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI						29,916,000.00							118,433,610.00	
		Terlaksananya Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Asuh/Oang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	21 Orang	29 Orang	17 Orang	18 Orang	29,916,000.00	Provinsi Gorontalo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		19 Orang	118,433,610.00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi						1,936,628,272.00					-		3,832,311,680.00	
	1.06.05.1.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga						818,982,500.00							3169960750.00	
		Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	5000 Orang	9000 Orang	4200 Orang	4300 Orang	818,982,500.00	Provinsi Gorontalo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4500 Orang	3,169,960,750.00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1.06.05.1.02.0011	Fasilitasi Bantuan Stimulan Modal Usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota						1,117,645,772.00							662,350,930.00	
		Terlaksananya fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha lintas daerah kabupaten/kota	750 Orang	737 Orang	550 Orang	400 Orang	1,117,645,772.00	Provinsi Gorontalo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		650 Orang	662,350,930.00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
6.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA						1,030,955,632.00							1,317,244,929.00	
		Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial	100%	100%	100%	100%	1,030,955,632.00						100%	1,317,244,929.00	
			Persentase sarana prasarana bagi korban bencana yang disediakan sesuai standar	100%	100%	100%	100%							100%		
			Persentase masyarakat didaerah rawan bencana yang meningkat kasiapsiagaannya	28%	23%	20%	22%							24%		
			Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah provinsi	100%	100%	100%	100%							100%		
	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi						1,030,955,632.00					Masyarakat yang Terdampak Bencana		1,317,244,929.00	
	1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan						983,702,232.00							834,441,800.00	
		Terpenuhinya Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	3000 Orang	6659 Orang	2200 Orang	2300 Orang	983,702,232.00	Provinsi Gorontalo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	-		2500 Orang	834,441,800.00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan						27,500,000.00							74,467,300.00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	100 Orang	503 Orang	100 Orang	100 Orang	27,500,000.00	Provinsi Gorontalo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	-		100 Orang	74,467,300.00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial						7,500,000.00							15,597,329.00	
		Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Provinsi	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	100 Orang	160 Orang	100 Orang	100 Orang	7,500,000.00	Provinsi Gorontalo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	-		100 Orang	15,597,329.00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1.06.06.1.01.0011	Penyediaan Sandang						5,000,000.00							249,924,500.00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Pengungsi dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	1000 Orang	930 Orang	1000 Orang	1000 Orang	5,000,000.00	Provinsi Gorontalo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	-		1000 Orang	249,924,500.00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1.06.06.1.01.0013	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi						7,253,400.00							142,814,000.00	
		Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	7,253,400.00	Provinsi Gorontalo	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	-		100 Orang	142,814,000.00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN						280,313,088.00							543,509,280.00	
		Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase taman makam pahlawan nasional yang terkelola dengan baik	100%	100%	100%	100%	280,313,088.00						100%	543,509,280.00	
	1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi						280,313,088.00					-		543,509,280.00	
	1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi						280,313,088.00							543,509,280.00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	2 Makam	2 Makam	2 Makam	2 Makam	280,313,088.00	Provinsi Gorontalo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Makam	543,509,280.00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						788,402,544.00							450,000,000.00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						788,402,544.00							450,000,000.00	
8.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						308,765,544.00							100,000,000.00	
	2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan						308,765,544.00					-		100,000,000.00	
	2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk						308,765,544.00							100,000,000.00	
		Terlaksananya Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	308,765,544.00	Provinsi Gorontalo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Laporan	100,000,000.00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL						197,704,000.00							100,000,000.00	
	2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi						197,704,000.00					-		100,000,000.00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	2.12.03.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil						197,704,000.00							100,000,000.00		
		Terlaksananya Fasilitasi Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	197,704,000.00	Provinsi Gorontalo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Laporan	100,000,000.00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
10.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						103,206,000.00							150,000,000.00		
	2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi						103,206,000.00					-		150,000,000.00		
	2.12.04.1.03.0002	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan						103,206,000.00							150,000,000		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	20 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	103,206,000.00	Provinsi Gorontalo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		20 Orang	150,000,000	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
11.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN						178,727,000.00							100,000,000		
	2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan						178,727,000.00					-		100,000,000		
	2.12.05.1.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi						178,727,000.00							100,000,000		
		Tersedianya Data Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	178,727,000.00	Provinsi Gorontalo	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dok	100,000,000	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		JUMLAH						20,388,991,460.00								21,297,119,343	

4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan untuk Pencapaian Program Prioritas Daerah, Kontribusi terhadap Pencapaian Target Nasional, Pencapaian SPM, dan Tematik Lainnya.

Rencana Kerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo Tahun 2027 disusun untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2029, RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2027, Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2027, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan telah memperhatikan tagging tematik sesuai pedoman Kementerian Dalam Negeri, sehingga kontribusi masing-masing subkegiatan terhadap pencapaian target pembangunan dapat diidentifikasi secara jelas.

Pada Tahun 2027, terdapat beberapa subkegiatan yang mendukung tema Pengentasan Kemiskinan, Penurunan Stunting, dan Ketahanan Pangan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.2
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN UNTUK PENCAPAIAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH, KONTRIBUSI TERHADAP PENCAPAIAN TARGET
NASIONAL, PENCAPAIAN SPM, DAN TEMATIK LAINNYA
TAHUN 2027

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2027	Pagu Indikatif	Prioritas Daerah	Prioritas Nasional	SPM	Tagging Kemiskinan	Tagging Stanting	Tagging Ketahanan Pangan	Penanggung Jawab
1	Program Pemberdayaan Sosial										
1.2	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi										
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	77 Keluarga	446.920.544	√			√			Bidang Pemberdayaan Sosial
2	Program Rehabilitasi Sosial										
2.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti										
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	14 Orang	191.652.000	√	√	√	√	√	√	Bidang Rehabilitasi Sosial
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	14 Orang	15.000.000	√	√	√	√	√		
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	14 Orang	6.360.000	√	√	√	√	√		
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	14 Orang	4.000.000	√	√	√	√	√		
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	14 Orang	155.582.316	√	√	√	√	√		
	Pemulasaraan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	2 Orang	10.000.000			√	√	√		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	27.838.189	√	√	√	√	√		
2.2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti										
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	55 Orang	864.450.000	√	√	√	√	√	√	Bidang Rehabilitasi Sosial

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2027	Pagu Indikatif	Prioritas Daerah	Prioritas Nasional	SPM	Tagging Kemiskinan	Tagging Stunting	Tagging Ketahanan Pangan	Penanggung Jawab
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	55 Orang	75.000.000	√	√	√	√	√		
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	55 Orang	4.000.000	√	√	√	√	√		
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	55 Orang	38.672.000	√	√	√	√	√		
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	55 Orang	5.000.000	√	√	√	√	√		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1 Dok	96.215.000	√	√	√	√	√		
2.3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti										
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	27 Orang	410.475.000	√	√	√	√	√	√	Bidang Rehabilitasi Sosial
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	27 Orang	39.999.000	√	√	√	√	√		
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	27 Orang	18.426.175	√	√	√	√	√		
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	27 Orang	4.000.000	√	√	√	√	√		
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	27 Orang	55.898.000	√	√	√	√	√		
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	27 Orang	320.681.544	√	√	√	√	√		
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	27 Orang	20.520.000	√	√	√	√	√		
	Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	4 Orang	10.000.000	√	√	√	√	√		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	1 Dok	29.028.000	√	√	√	√	√		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2027	Pagu Indikatif	Prioritas Daerah	Prioritas Nasional	SPM	Tagging Kemiskinan	Tagging Stunting	Tagging Ketahanan Pangan	Penanggung Jawab
2.4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Pant										
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	10 Orang	98.832.000	√	√	√	√	√	√	Bidang Rehabilitasi Sosial
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	10 Orang	15.000.000	√	√	√	√	√		
	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	10 Orang	67.778.000	√	√	√	√	√		
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial		10 Orang	9.360.000	√	√	√	√	√		
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari		10 Orang	116.921.544	√	√	√	√	√		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis		1 Dok	14.926.450	√	√	√	√	√		
2.5	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pant										
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	1 Dok	104.940.000	√	√	-	√	√		Bidang Rehabilitasi Sosial
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial										
3.1	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal										
	Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	18 Orang	29.916.000	√	√	-	√			Bidang Rehabilitasi Sosial
3.2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi										
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	4300 Orang	818.982.500	√	√	-	√	√	√	Bidang Penanganan Fakir Miskin
	Fasilitasi Bantuan Stimulan Modal Usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha lintas daerah kabupaten/kota	600 Orang	1.117.645.772	√	√	-	√			

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2027	Pagu Indikatif	Prioritas Daerah	Prioritas Nasional	SPM	Tagging Kemiskinan	Tagging Stunting	Tagging Ketahanan Pangan	Penanggung Jawab
4	Program Penanganan Bencana										
4.1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi										
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	2300 Orang	983.702.232	√	√	√	√			Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	1000 Orang	5.000.000	√	√	√	√			
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	100 Orang	7.253.400	√	√	√	√			
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	100 Orang	27.500.000	√	√	√	√			
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	100 Orang	7.500.000	√	√	√	√			
5	Program Pendaftaran Penduduk										Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5.1	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan										
	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	308.765.544	√	√		√	√		
6	Program Pencatatan Sipil										
6.1	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi										
	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	197.704.000	√	√		√			
7	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan										
7.1	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi										
	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	30 Orang	103.206.000	√	√		√	√		
8	Program Pengelolaan Profil Kependudukan										
8.1	Penyediaan Profil Kependudukan										
	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia	1 Dokumen	178.727.000	√	√		√			

BAB V

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

5.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2027

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. IKU Tahun 2027 disusun berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 dengan memperhatikan capaian kinerja serta hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Evaluasi tersebut menjadi dasar dalam penyempurnaan target agar lebih realistis, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Penetapan IKU Tahun 2027 juga mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, perkembangan kondisi lingkungan strategis, serta kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berlaku. Dengan demikian, indikator yang ditetapkan diharapkan mampu menjadi instrumen pengukuran kinerja yang efektif dalam mewujudkan sasaran strategis Perangkat Daerah.

Adapun target Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2027

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline 2025	Target 2027	Ket
1	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat yang inklusif dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan serta pencatatan Sipil	Indeks Kesejahteraan Sosial	Persen	51,92%	54,80%	
2	Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat	Persentase masyarakat rentan yang mendapatkan perlindungan sosial	Persen	45%	23,00%	
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Pemanfaatan Data Kependudukan berbasis Digital	Jumlah Daerah dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkategori "Sangat Baik"	Daerah	N/A (Indikator baru)	1	

5.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2027

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Target IKK Tahun 2027 mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 serta mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 guna memastikan adanya peningkatan kualitas pelayanan dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Penyusunan target IKK dilakukan dengan memperhatikan tingkat capaian tahun sebelumnya, kapasitas kelembagaan, ketersediaan anggaran, serta arah kebijakan pembangunan daerah. Indikator ini menjadi salah satu instrumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan.

Adapun target Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.2
Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2027

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline 2025	Target 2027	Ket
	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial				
1	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial	Persen	100	100	
2	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	Persen	100	100	
3	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	Persen	100	100	
4	Persentase sarana prasarana bagi korban bencana yang disediakan sesuai standar	Persen	100	100	
5	Persentase sarana prasarana yang disediakan bagi peyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan/atau gelandangan dan pengemis didalam panti yang layak dan sesuai standar	Persen	100	100	
6	Persentase sarana prasarana bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang disediakan secara layak dan sesuai standar	Persen	100	100	
7	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi	Persen	98,91	100	

	kebutuhan dasarnya di dalam panti				
8	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persen	100	100	
9	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persen	100	100	
10	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	90	100	
11	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	Persen	100	100	
12	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah provinsi	Persen	97,85	100	
13	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Persen	36,42	17,4	
14	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	Persen	11,75	9,57	
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
15	Tingkat Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Persen	66,67	69,33	
16	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persen	100	100	
17	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	100	100	
18	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Persen	100	100	
19	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Persen	15,04	12	
20	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persen	67,07	57	
21	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	99,85	99,3	
22	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	100	100	
23	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	100	100	
24	Jumlah Dokumen Data Kependudukan Provinsi Yang Tersedia	Dok	1	1	

Target Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 selanjutnya menjadi dasar dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah. Pencapaian indikator-indikator tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya sasaran strategis Perangkat Daerah serta memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

BAB VI PENUTUP

1.1 Catatan Penting yang perlu menjadi perhatian

Rencana Kerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo Tahun 2027 disusun sesuai dengan target yang ingin dicapai. Ketersediaan anggaran menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan renja yang sesuai dengan kebutuhan. Jika ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan rencana kerja maka diperlukan penyesuaian seperti pengurangan sub kegiatan yang memiliki prioritas paling sedikit dalam mendukung target IKU maupun IKK. Selain itu juga dapat dilakukan dengan penyesuaian target output kegiatan, akan tetapi tetap mempertimbangkan capaian target IKU maupun IKK tahunan dalam renstra.

a. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo Tahun 2027 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Seluruh aparatur pada perangkat daerah dan stakeholder terkait harus melaksanakan rencana yang sudah ditetapkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- c. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya, maka unsur perangkat daerah harus senantiasa melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Renja yang sudah ditetapkan.

b. Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjamin terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut maka rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan kedepan antara lain :

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada untuk melaksanakan kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan;
- b. Memperkuat koordinasi antar unsur perangkat daerah dan stakeholder;
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala melalui kunjungan lapangan, pembuatan laporan, rapat koordinasi berkala, pendampingan teknis dll;
- d. Menyusun dan melaksanakan standar operasional prosedur kegiatan;
- e. Memberikan reward dan punishment yang berkeadilan sesuai performa masing-masing.

Lampiran II

FORMULIR E.29
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Rencana Kerja Perangkat
Daerah Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
Gorontalo Tahun 2027

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah provinsi dan Agenda Kerja Perangkat Daerah provinsi.	√			
2	Pengolahan data dan informasi.	√			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah.	√			
4	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah provinsi tahun lalu berdasarkan Renstra-Perangkat Daerah Provinsi.	√			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Provinsi	√			
6	Penelaahan rancangan awal RKPD provinsi.	√			
7	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8	Penelaahan usulan Masyarakat	√			
9	Penelaahan kegiatan prioritas	√			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Provinsi				
a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kabupaten/kota.	√			
B	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi.	√			
c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi sesuai surat edaran Gubernur	√			
14	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			
15	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			
16	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
17	Dokumen Renja Perangkat Daerah provinsi yang telah disyahkan.	√			

KEPALA DINAS,

REFLIN BUATA, SE, M.Ec.Dev
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19761228 200012 1 002